

EDISI 05 | TAHUN 2020



SMA

**MAJU BERSAMA
HEBAT SEMUA**

MEDIA KOMUNIKASI MEMBANGUN DAN MEMAJUKAN SMA

*Merdeka
Belajar*



9 772828 835008

daftar isi



05

Salam Redaksi

Purwadi Sutanto
Direktur SMA



26

Penilaian

**Hapus UN,
Dorong Merdeka Belajar**
Ujian Nasional

08

Fokus

Merdeka Belajar

untuk Pendidikan Berkualitas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar". Babak baru pembenahan pendidikan nasional untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.



SMA Maju Bersama Hebat Semua

Media Komunikasi Membangun dan Memajukan SMA

Pengarah
Purwadi Sutanto

Pemimpin Redaksi
Winner Jihad Akbar

Dewan Redaksi
Mulyatsyah, Juandanihsyah,
Hastuti Mustikaningsih,
Ekawati.

Redaktur Ahli
Agus Salim, Augustin
Wardhani.

Redaktur Pelaksana
Jim Bar Pen

Redaksi
Nurul Mahfudi, Uce
Verijanti, Wiwiet
Heriyanto, Aam Masroni,
Erik Herdian Karsana,
Umi Wahyuningsih, Joni
Faisal.

Desain dan Layout
Wahyu Akbar

Sekretariat Redaksi
Widya Hendriani

Direktorat SMA
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Jl. RS Fatmawati, Cipete,
Jakarta Selatan.

☎ 021-75911532

📘 Direktorat PSMA

🌐 direktorat.sma

📱 @dit_psma

🏢 DITPSMA KEMDIKBUD

🌐 www.pasma.kemdikbud.go.id

42

Mozaik

Ki Hajar Dewantara
Sang Guru Bangsa



44

Kolom

Kewirausahaan SMA
Implementasi Pembelajaran
Kewirausahaan SMA

22

Tata Kelola

Manajemen Berbasis Sekolah
Memerdekakan Sekolah Melalui MBS

28

Peserta Didik

Pusat Prestasi Nasional
Wadah Prestasi Anak Indonesia

16

24

Kelembagaan Sarpras

Renovasi Bangunan SMA
Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas
dan Kuantitas Sarana

30

Profil

SMAN 4 Kota Banda Aceh
Lebih Optimal Belajar Digital

Khusus

Bersama Lawan Corona
Informasi COVID-19



MEMPERINGATI

Hari Puisi Dunia

21 MARET

"PUISI ADALAH
SUARA SEKALIGUS
KAKI BAGI HATI"

HELVY TIANA ROSA
-SASTRAWAN





KITA DAN MERDEKA BELAJAR

PURWADI SUTANTO
DIREKTUR SMA



Salam Redaksi,

Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah diatur dalam kuasa-Nya. Pun demikian dengan peristiwa yang terjadi dalam tiga bulan pertama di tahun 2020 ini. Wabah virus Corona yang dikenal dengan sebutan Covid-19 makin menyebar, bukan saja di daerah asalnya di Wuhan, Cina, tapi juga merembet ke negara tetangga, bahkan hingga Eropa dan lintas dunia. Penyebaran yang makin masif di tingkat global ini pun membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 menjadi pandemi.

Dampak yang terjadi tentu luar biasa. Dunia global dan tentu saja Bangsa Indonesia bahu-membahu melawan Corona karena berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Tak terkecuali dengan dunia pendidikan.

Kebijakan pemerintah (Khususnya di daerah terdampak parah) menerapkan *social distancing* misalnya, memaksa institusi pendidikan di berbagai jenjang termasuk SMA untuk memberhentikan kegiatan pembelajaran di sekolah. Peserta didik sementara waktu belajar di rumah.

Lantas apa yang bisa kita lakukan? Beruntung Pak Mendikbud di awal jabatannya melakukan gebrakan dengan mengeluarkan kebijakan "Merdeka Belajar". Maka pucuk di cinta, ulam pun tiba. Kebijakan Mendikbud menemukan salah satu momentum awal yang menegaskan bahwa belajar sejatinya bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun. Terlebih dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pembelajaran

melalui sistem daring. Secara fisik terpisah, namun pembelajaran tetap bisa berlangsung.

Tak hanya memberikan panduan bagaimana proses pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan, Mendikbud pun mengeluarkan Surat Edaran terkait langkah yang bisa dilakukan instansi pendidikan terkait dan juga satuan pendidikan untuk menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, aplikasi Rumah Belajar dari Kemdikbud juga bisa diakses secara gratis oleh peserta didik, membuat langkah dunia pendidikan makin siap dalam menghadapi kondisi yang semoga tak lama lagi berakhir.

Topik Merdeka Belajar dan pandemi Covid-19 ini pun menjadi dua bahasan yang disajikan pada majalah SMA edisi kali ini. Selamat membaca!





ToT Supervisi UN SMA

Bogor, 9-11 Maret 2020, Direktorat SMA menyelenggarakan *Training of Trainer Supervisi Ujian Nasional SMA Tahun 2020*. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Arch ini merupakan pembekalan bagi petugas yang akan melaksanakan supervisi Ujian Nasional SMA yang diselenggarakan terakhir pada tahun ini. Supervisi dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang berbagai aktivitas dan peran serta kepala sekolah, pendidik, dan peserta UN.

Dalam pembukaan acara, turut hadir memberikan sambutan sekaligus membuka acara Direktur SMA, Drs. Purwadi Sutanto. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan agar para *supervisor* bertugas sesuai dengan tupoksi nya, mulai dari memotret dan mencatat pelaksanaan UN di sekolah, keterlibatan dinas, dan *supervisor* diminta untuk mencatat apa saja kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan UN. Catatan atas kendala UN tahun terakhir ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan asesmen tahun depan. Selain itu, Purwadi juga menegaskan kepada *supervisor* agar tidak menerima segala bentuk pemberian, baik berupa barang maupun uang dari sekolah. ●



BERITA DIREK- TORAT SMA



Pengembangan Kompetensi Pegawai

Bogor, 26-28 Februari 2020, Direktorat SMA menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Direktorat SMA di Padjadjaran Suite Resort & Convention Hotel. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Direktorat SMA ini berbentuk permainan kreatif dan edukatif, *outbond* sebagai *personal development* dan *team development*, stimulasi, diskusi, dan petualangan.

Tujuan dari diselenggarakannya acara ini selain sebagai ajang *refreshing*, juga sebagai ajang silaturahmi dan menjalin kerjasama yang baik antara pegawai dan pimpinan yang terdapat di lingkungan Direktorat SMA. Selain itu, melalui acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan budaya kerja Direktorat SMA yang disiplin dan bertanggung jawab, serta dapat meningkatkan kemandirian, inisiatif, dan inovatif dalam bekerja. ●





Pelantikan Pejabat Direktorat SMA

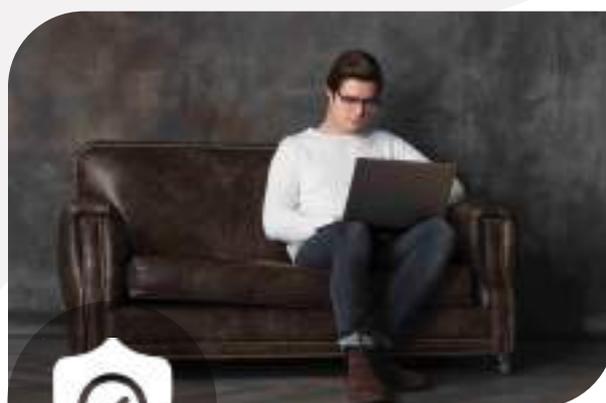
Jakarta, 26 Februari 2020, Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Ainun Naim melantik 11 pejabat tinggi pratama (eselon II) dan 632 pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pelantikan dilaksanakan dalam dua gelombang di Graha Utama dan Plaza Insan Berprestasi, Kantor Kemendikbud.

Dalam kesempatan yang sama di lingkungan Direktorat SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen) dilantik juga Pejabat fungsional sebagai berikut: (1) Winner Jihad Akbar sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya Dit. SMA, (2) Hastuti Mustikarningsih sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya Dit. SMA, (3) Juandanihsyah sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya Dit. SMA, (4) Mulyatsyah sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya Dit. SMA, (5) Augustin Wardhani sebagai Perencana Ahli Muda Dit. SMA, (6) Agus Salim sebagai Perencana Ahli Muda Dit. SMA, (7) Rina Imayanti sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Dit. SMA, (8) Junus Simangunsong sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda, Dit. SMA, (9) Alex Firngadi sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Dit. SMA, (10) Untung Wismono sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Dit. SMA, dan (11) Dhany Hamiddan Khoir sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Dit. SMA. ●

"Icon made from www.flaticon.com"

Working From Home Direktorat SMA

Jakarta, 16 Maret 2020, merebaknya wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia dan pertambahan penderitanya yang signifikan membuat beberapa kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan mengenai *Working From Home*. *Working From Home* dilaksanakan terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020. Selain *Working From Home*, Kemendikbud juga menghimbau untuk menunda penyelenggaraan acara yang mengundang banyak peserta, khususnya dari daerah, dan dapat menggantinya dengan *video conference* atau komunikasi *online* lainnya. Semoga dengan diberlakukannya kebijakan ini dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. ●



Mendekakan Belajaran

UNTUK PENDIDIKAN
BERKUALITAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Babak baru pembenahan pendidikan nasional untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.



Merdeka Belajar. Inilah gebrakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A. Makarim. Lantas, apakah selama ini pendidikan kita belum merdeka? Pertanyaan senada di ranah publik pun merebak. Pun demikian yang sampai ke telinga Mas Menteri, demikian panggilan akrab Mendikbud. "Banyak kritik dari kebijakan yang akan diterapkan," ujarnya.

Namun demikian, tentu hal yang umum ketika ada pihak yang mengkritisi kebijakan baru. Pun demikian kebijakan di bidang pendidikan Merdeka Belajar yang digagas Mendikbud. Tapi yang jelas, kebijakan yang diambil Mas Menteri menjadi bentuk tindaklanjut arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Di samping tentu saja sudah melauai kajian dan pertimbangan yang matang.

Soal substansi dan konsep yang diusungnya, Mendikbud menjelaskan, Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. "Terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di murid," kata Nadiem dalam Diskusi Standard Nasional Pendidikan, di Hotel Century Park, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019.

Guru memang menjadi sentral kemerdekaan berpikir. Dalam kebijakan mengembalikan penilaian Ujian Sekolah Berbasis Nasional ke sekolah, misalnya, menurut Mendikbud, seharusnya tak ada orang yang meremehkan kemampuan seorang guru. Menurut dia, menjadi guru adalah tugas yang sulit.

Selanjutnya Mendikbud menyebut, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. "Tanpa guru melalui proses interpretasi, refleksi dan proses pemikiran secara mandiri, bagaimana menilai kompetensinya, bagaimana menerjemahkan kompetensi dasar, ini menjadi suatu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang baik," jelasnya.

Peran yang tidak mudah memang, terlebih dengan administrasi pendidikan dan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas selama ini. Menurut Mendikbud, administrasi pendidikan adalah suatu proses di mana guru kejar tayang menyelesaikan materi. Sedangkan, pembelajaran justru terjadi ketika guru bisa menerjemahkan kurikulum. "Mencari jalannya sendiri, baru keluar lagi kepada murid. Dengan terjadinya proses refleksi dan meta kognitif guru,

maka barulah terjadi proses refleksi siswa dan meta kognitif siswa," kata Mendikbud yang menegaskan, proses tersebut wajib dilaksanakan semua guru.

Secara tegas, Mendikbud juga menegaskan bahwa semua guru harus berpikir secara mandiri. Pembelajaran, lanjutnya, tidak akan terjadi jika hanya administrasi pendidikan yang terjadi. "Paradigma merdeka belajar adalah untuk menghormati perubahan yang harus terjadi agar pembelajaran itu mulai terjadi di berbagai macam sekolah."

Empat Program Pokok Kebijakan

Perlu menjadi catatan penting, substansi Merdeka Belajar yang menjadi perhatian Mendikbud adalah ingin menciptakan suasana belajar di sekolah dengan suasana yang menggembirakan. "Makanya tag-nya Merdeka Belajar," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga dalam Diskusi Polemik tentang 'Merdeka Belajar Merdeka UN' di Hotel Ibis Jakarta Thamrin, Sabtu, 14 Desember 2019.

Dengan kata lain, tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, siswa, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. "Merdeka belajar itu bahwa pendidikan itu harus menciptakan suasana, suasana yang membahagiakan. Bahagia buat siapa? Bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orang tua, untuk semua umat," papar Ade.

Sementara itu terkait program pokok kebijakan Merdeka Belajar, Kemdikbud meluncurkan empat program yang menjadi arah pembelajaran kedepan. Keempat program ini juga fokus pada arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Secara khusus, Mendikbud meluncurkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan "Merdeka Belajar" pada Rabu, 11 Desember 2020. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).



“Melalui kebijakan ini, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujar Mendikbud.

Pokok kebijakan kedua mengenai ujian nasional (UN). Tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. Penyelenggaraan UN pada tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Lebih jauh Mendikbud menjelaskan, pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” kata Mendikbud.

Kebijakan ketiga terkait dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam konteks ini, Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen RPP. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

“Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.

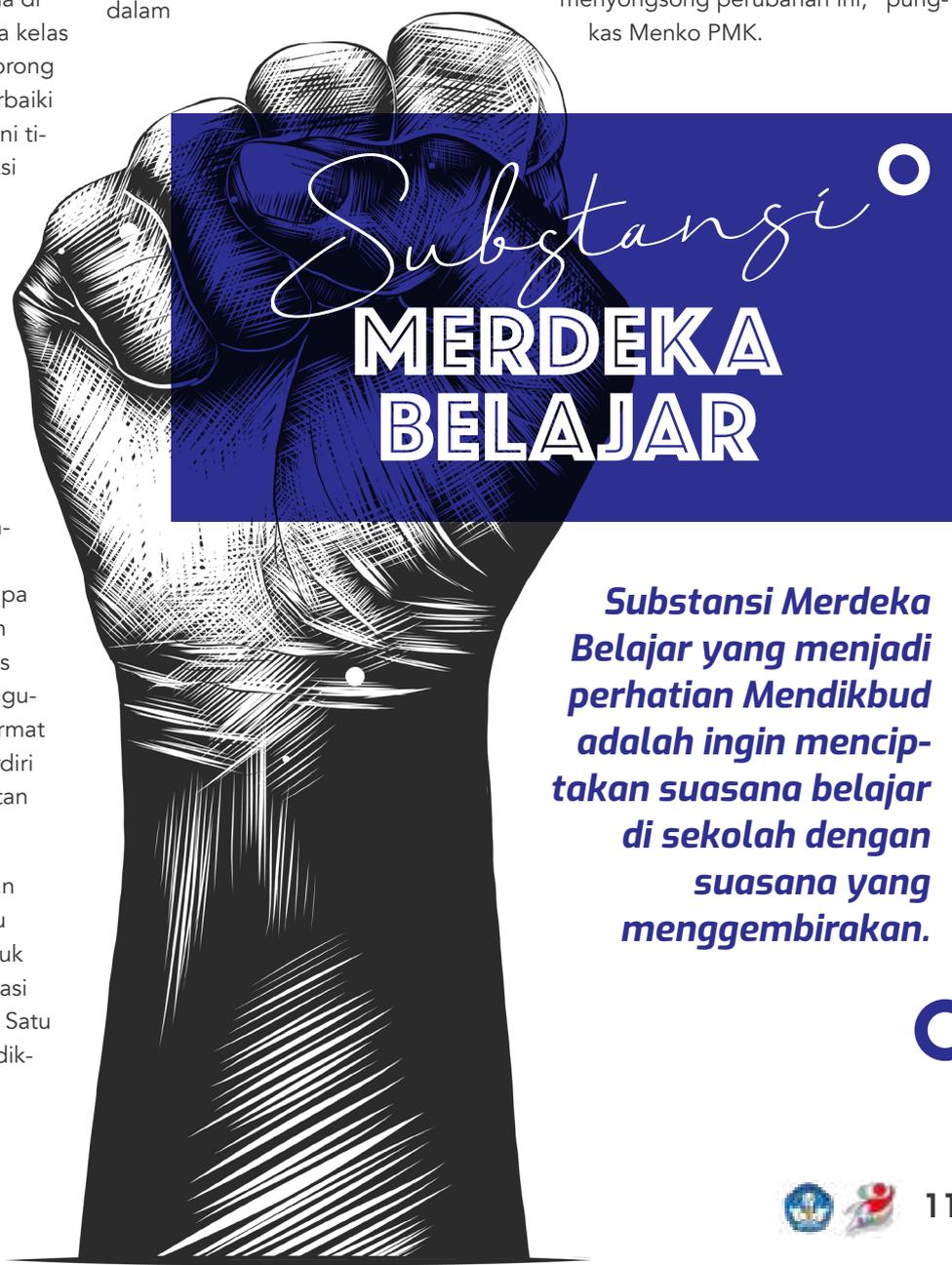
Sementara terkait pokok kebijakan keempat adalah penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

Dalam kebijakan baru PPDB juga disebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Karena itu, Mendikbud berharap, pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam

memeratakan akses dan kualitas pendidikan.

“Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” kata Mendikbud.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada kesempatan yang sama, memberikan apresiasi kepada Mendikbud atas gagasan “Merdeka Belajar”. Kemenko PMK mendukung inisiatif Kemendikbud mengangkat gagasan tersebut. Dengan kebijakan tersebut, menurut Muhadjir, guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa pun bisa lebih banyak belajar. “Mari kita semua bersikap terbuka dan optimis dalam menyongsong perubahan ini,” pungkask Menko PMK.



Substansi Merdeka Belajar yang menjadi perhatian Mendikbud adalah ingin menciptakan suasana belajar di sekolah dengan suasana yang menggembirakan.



“Jika hanya pemerintah yang maju maka kebijakan ini akan gagal. Oleh karena itu, harus ada perubahan pola pikir. Sebab yang bisa melakukan pendidikan secara tepat, holistik, inklusif, dan relevan hanya kombinasi antara pemerintah dan masyarakat.”

- Mendikbud Nadiem Makarim



Sasaran Merdeka

Setelah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar dan “Kampus Merdeka”, Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan ada “sasaran” penting lain yang akan menjadi fokus perubahan selanjutnya di Kemendikbud. Dua di antaranya adalah soal kurikulum dan guru.

“Jadi seratus hari ini, semua kita analisis mana yang bisa dilakukan sekarang, untuk mulai memotong rantai-rantai sekat-sekat regulasi yang menghalangi proses inovasi di dalam unit pendidikan kita,” ujar Mendikbud. Ia menambahkan, selanjutnya masuk ke peningkatan kualitas guru, kurikulum dan lain-lain. “Itu masih butuh waktu lebih lama untuk mematangkan konsep

merdeka belajar ini,” ujar Mendikbud pada ajang Indonesia Data and Economic Conference (IDE) 2020 di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

Dalam kesempatan sama, Mendikbud mengungkapkan, terhadap adanya resistensi di masyarakat mengenai kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ia menganggap wajar karena jika ingin melakukan perubahan maka harus dilakukan secara drastis. “Saya harap semua orang mengerti bahwa di Indonesia tidak ada satu pun bidang pemerintahan yang tidak harus ada lompatan. Semuanya butuh lompatan. Memang negara kita begitu besar dan kita harus mengejar,” ujar Nadiem.

Mendikbud menambahkan, “Kalau tidak ada yang resisten artinya perubahan besar tersebut tidak cukup berdampak. Jadi saya melihat resistensi positif itu jadi tantangan buat kita,” katanya. Ia berharap, kebijakan Merdeka Belajar akan semakin banyak mengundang partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam proses pendidikan.

Di samping itu, Mendikbud juga menegaskan, jika hanya pemerintah yang maju maka kebijakan ini akan gagal. Oleh karena itu, harus ada perubahan pola pikir. Sebab yang bisa melakukan pendidikan secara tepat, holistik, dan inklusif, dan relevan hanya kombinasi antara pemerintah dan masyarakat.

Langkah Direktorat SMA

Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Mendikbud langsung ditindak-lanjuti seluruh unit di lingkungan internal Kemdikbud, tak terkecuali Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sebagaimana dikemukakan Direktur SMA Purwadi Sutanto, sebagai unit utama di lingkungan Kemdikbud, Direktorat SMA mengawal sekaligus memastikan Kebijakan Merdeka Belajar bisa dilaksanakan di seluruh jenjang SMA di seluruh Indonesia. "Bersinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, kita sama-sama pastikan Kebijakan Pak Menteri ini bisa dilaksanakan dan berjalan dengan baik," ujar Purwadi dalam beberapa kesempatan.

Dari keempat kebijakan merdeka belajar, tentu saja kebijakan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi yang terlebih dahulu direalisasikan karena merupakan penyempurnaan kebijakan sebelumnya. Sebagaimana ditegaskan Direktur SMA, kebijakan PPDB zonasi adalah kebijakan pemerataan mutu sekolah terutama sekolah negeri, yang diharapkan adalah menghilangkan kastanisasi sekolah-sekolah negeri, memangkas sekolah-sekolah favorit. Karena Sekolah Negeri merupakan sekolah publik yang dibuat oleh negara dibiayai negara untuk seluruh warga negara. "Sekolah diperuntukkan untuk seluruh warga negara tanpa kecuali. Tidak eksklusif," ujar Purwadi.

Sementara itu, sebagai tindaklanjut implementasi keempat kebijakan Merdeka Belajar, Direktorat SMA juga melakukan pengembangan dengan menyusun "Buku Saku Merdeka Belajar SMA". Penyusunan buku ini, menurut Purwadi, akan menjadi panduan sekaligus acuan bagaimana satuan pendidikan jenjang mengimplementasikan Merdeka Belajar.

Tak hanya melakukan penyusunan buku saku, SDM di lingkungan Direktorat SMA juga mendapat pengayaan tentang Merdeka Belajar dengan mengikuti diskusi yang menghadirkan narasumber dari UPI, Prof. Dr. Dinn Wahyudin, MA. Dalam diskusi yang digelar pada 16-18 Maret 2020 tersebut dikupas mengenai konsep Merdeka Belajar, Kajian Teori, dan Teknis Implementatif.

Pada kesempatan tersebut Dinn di antaranya mengemukakan tafsir Merdeka Belajar, yakni bagi guru dan sekolah, adalah memiliki kemandirian dan kebebasan untuk merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran melalui pendekatan

inovatif agar tercapainya pembelajaran yang optimal dan bermakna bagi peserta didik. Sementara tafsir bagi peserta didik, Merdeka Belajar adalah peserta didik memiliki kemandirian dan kebebasan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan dan hasil belajar yang produktif, melalui pembelajaran efektif inovatif guna menyongsong masa depan yang lebih baik.

Implementasi Merdeka Belajar, menurut Dinn, juga terinspirasi dari lima tokoh dunia pendidikan dunia. Satu di antaranya adalah tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan konsep pendidikan yang memerdekakan. Menurut Ki Hajar, dalam pendidikan, kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu "dipelopori" atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain, akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri". Sementara untuk pendidik, pemikiran Ki Hajar adalah Tut Wuri Handayani, Ing Madyo Mangun Karso, dan Ing Ngarso Sing Tulodo (lihat grafis).

**PEMIKIRAN
KI HAJAR DEWANTARA**

"TUT WURI HANDAYANI"	<i>Ketika di belakang, Guru harus memberi semangat dan motivasi</i>
"ING MADYO MANGUN KARSO"	<i>Ketika di tengah, Guru harus bekerja keras dan membangun kinerja</i>
"ING NGARSO SING TULODHO"	<i>Ketika di depan, Guru harus memberikan contoh yang baik</i>



Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di SMA



Guru, sebagaimana dikemukakan Mendikbud, memang menjadi sentral kemerdekaan berpikir. Dalam hal ini Dinn juga menyatakan guru harus menjadi penggerak Merdeka Belajar. Ciri guru penggerak antara lain pertama Guru Inovatif, yakni guru yang memiliki kemampuan Merancang bahan ajar secara inovatif dan menarik perhatian. Kedua, Guru Kreatif, guru yang mampu mengkreasi suasana belajar menyenangkan. Ketiga, Fasilitator, guru yang mampu memfasilitasi peserta didik dalam bertukar pikiran. Keempat, Katalisator, guru mampu mengidentifikasi, dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Kelima, guru mampu memotivasi agar peserta didik dapat belajar dari ragam sumber belajar.

Dalam konteks penguasaan kompetensi Abad 21, menurut Dinn, konsep Merdeka Belajar juga memiliki relevansi yang sangat erat. Ia pun merinci kerangka kerja dan kompetensi abad 21 serta aspek yang harus dicapai melalui konsep Merdeka Belajar (Lihat Tabel: Merdeka Belajar dan Kompetensi Abad 21).

Langkah Direktorat SMA dalam mendukung Merdeka Belajar ini tentu saja belum final dan masih terus berproses. Salam Merdeka Belajar. ●

MERDEKA BELAJAR DAN KOMPETENSI ABAD 21

FRAME WORK	IP-21 CSS	ASPECT
Creativity Thinking & Innovation	4C	<ul style="list-style-type: none"> Berpikir kreatif Belajar kreatif
Critical Thinking and Problem Solving		<ul style="list-style-type: none"> Penalaran efektif Membuat penilaian dan keputusan Memecahkan masalah
Communication & Collaboration		<ul style="list-style-type: none"> Berkomunikasi dengan jelas, Berkolaborasi dengan orang lain
Information, Media, & Technology	ICT	<ul style="list-style-type: none"> Mengakses dan mengevaluasi informasi Menggunakan dan menata informasi Mengaplikasikan teknologi secara efektif
Life & Career Skills and Value	Character Building	<ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan perilaku saintifik: Hasrat ingin tahu, jujur, teliti, dan terbuka Menunjukkan penerimaan nilai moral yang berlaku
	Spiritual Values	<ul style="list-style-type: none"> Menghayati dan mengamalkan ketuhanan Internalisasi nilai spiritual dalam kehidupan

MENDIKBUD

Nadiem Makarim

Gerbang Generasi Milenial Telah Dibuka

izinkan saya berbicara langsung kepada generasi muda negara ini, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat menjadi pembina upacara Peringatan ke-91 Hari Sumpah Pemuda di Kantor Kemdikbud 28 Oktober 2019. Pernyataan tersebut ditegaskan Mendikbud karena selain membacakan pidato resmi Hari Sumpah Pemuda dari Menteri Pemuda dan Olahraga ia juga menyampaikan pesan khusus yang ditujukan untuk generasi muda Indonesia.

Sebagai menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju, Mendikbud menegaskan, ia hadir dalam upacara untuk mewakili generasi milenial ke bawah. Kehadirannya membuka berbagai macam kesempatan untuk generasi berikutnya. "Kawan-kawan pemuda, gerbang kita telah terbuka," ujarnya.

Tantangan tentu tak mudah. Tapi anak muda harus mampu membuktikannya. Seperti misalnya ketika ada pihak-pihak yang mempertanyakan kemampuannya memimpin Kemdikbud, termasuk dalam memenuhi ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi. "Waktulah yang akan menjawab. Tapi pada saat saya diberikan kesempatan dari Pak Presiden untuk membantu generasi berikutnya, saya tidak berpikir dua kali. Saya melangkah ke depan, apa pun risikonya," tegasnya.

Mendikbud mengemukakan, saat ini generasi muda Indonesia hidup dalam dunia yang bising karena banyak bisikan, godaan, dan pendapat. Di dalam kegaduhan tersebut sering sekali suara hati generasi muda terabaikan. Ia yakin pemuda Indonesia sadar di hatinya masing-masing, ke mana tujuan mereka ingin melangkah. Namun, kebisingan-kebisingan tersebut membuat generasi muda meragukan dirinya masing-masing, takut dipermalukan, takut dimusuhi, atau takut gagal.

"Kawan-kawan pemuda, satu-satunya kegagalan adalah kalau kita hanya diam di tempat. Dan satu-satunya kesuksesan adalah kalau kita terus melangkah ke depan. Kita mungkin tersandung-sandung, kita mungkin jatuh, tapi kita tidak akan tiba di tujuan hati kita kalau kita tidak melangkah bersama," ujar Mendikbud memotivasi para pemuda. Ia menambahkan, generasi muda agar tidak hanya menunggu dunia berubah, karena dunia ada di tangan pemuda. "Asal kita berani melangkah, kita tak akan pernah kalah," katanya.

(Sumber: BKLM Kemdikbud/www.kemdikbud.go.id)

BERSAMA LAWAN CORONA!

C O V I D - 1 9

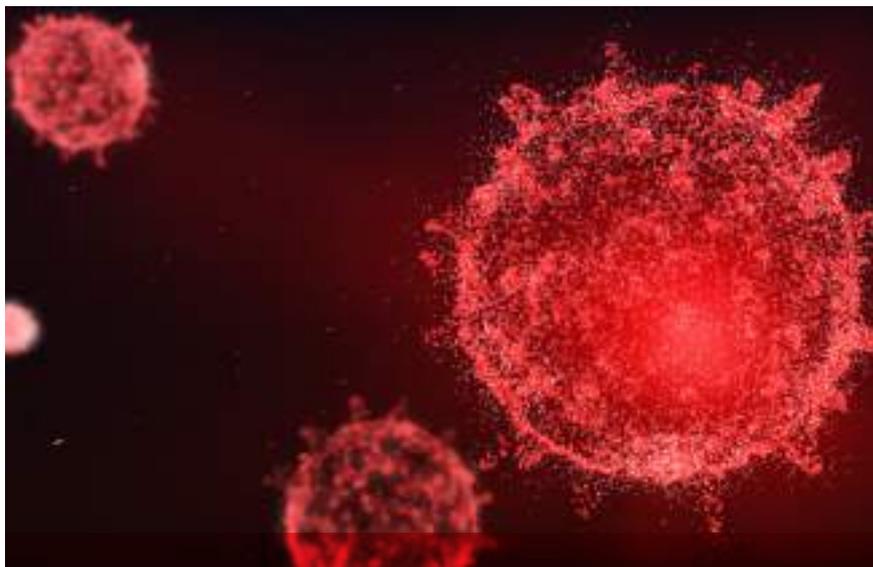
C O R O N A V I R U S

Covid-19. Ini adalah nama resmi yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) untuk menyebut virus yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019. Gejala klinis seseorang yang terinfeksi mirip dengan penyakit flu, yaitu demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, letih dan lesu, hingga sesak napas.

Covid-19 seperti dijelaskan WHO dan laman infeksiemerging.kemkes.go.id serta sehatnegeriku.kemkes.go.id milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, merupakan jenis virus baru yang masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Orang yang terinfeksi virus ini akan memiliki gejala demam, batuk, sesak napas dan kesulitan bernapas. Virus dapat menyebar dari manusia ke manusia lewat batuk, bersin, atau kontak dekat. Orang yang kebetulan berdekatan dengan objek yang tertempel virus juga bisa terinfeksi.

Sampai saat ini, para ahli masih melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, cara penularan, pola klinis, serta perjalanan penyakit. Hasil penyelidikan sementara dari beberapa institusi di Kota Wuhan, menunjukkan, sebagian kasus terjadi pada orang yang bekerja di pasar hewan/ikan. Saat ini, belum ditemukan bukti soal hewan peliharaan, seperti anjing atau kucing, bisa terinfeksi Covid-19. WHO masih menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan penularnya. Oleh karena itu, jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan.

Siapa pun dapat terinfeksi virus ini. Namun, bayi dan anak kecil, serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, seseorang yang tinggal



Ilustrasi bentuk Covid-19

atau berkunjung ke daerah yang rawan virus corona, juga berisiko terserang virus ini. Petugas kesehatan yang merawat pasien positif Covid-19 juga berisiko tertular sehingga mereka harus konsisten melindungi diri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat.

Seperti virus lain pada umumnya, penyebarannya dapat melalui percikan air liur pengidap baik dari batuk juga bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona.

Infeksi Covid-19 bisa menyebabkan gejala seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Beberapa orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas. Bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi gangguan medis seperti diabetes dan penyakit jantung, atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, biasanya rentan sakit parah dan dapat memicu kematian.

Mengutip The Guardian, dokter pernapasan Prof John Wilson mengatakan bahwa orang-orang yang terinfeksi Covid-19 dapat dibagi menjadi empat kategori. Pertama, pasien yang tergolong pada kategori subklinis. Pada kategori ini, pasien terinfeksi virus corona tetapi tidak menunjukkan gejala apa pun. Kedua, orang yang terinfeksi pada saluran pernapasan atas. "Artinya, seseorang mengalami demam dan batuk serta gejala ringan seperti sakit kepala atau konjungtivitis," jelas Wilson. Menurut dia, pasien di kategori ini dapat menularkan virus tetapi mungkin tidak menyadarinya.

Ketiga, merupakan kelompok terbesar yaitu mereka yang positif terinfeksi Covid-19 dan perlu dirawat di rumah sakit atau menjalani operasi. Keempat, pasien yang mengalami gejala yang parah. WHO juga menyebutkan bahwa orang yang lebih tua atau dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi, masalah jantung, dan masalah paru-paru atau diabetes, memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami gejala lebih serius.



Mati dengan Disinfektan

Masa inkubasi virus ini belum diketahui pasti. Namun, jika merujuk data kasus penyakit akibat coronavirus sebelumnya, seperti MERS dan SARS, masa inkubasi 2019-nCoV rata-rata gejala akan timbul pada hari ke 2 s.d.14 setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sampai saat ini peneliti belum dapat memastikan metode transmisi virus dan memastikan berapa lama Covid-19 bisa bertahan di permukaan suatu benda seperti logam, gelas atau plastik.

Namun bila Covid-19 ini menyerupai virus corona sebelumnya yang menyebabkan SARS dan MERS, ia dapat bertahan hidup di atas permukaan selama sembilan hari. Sebagai perbandingan, virus flu dapat bertahan di permukaan hingga 48 jam. Dalam studi yang dipublikasikan 6 Februari 2020 pada *The Journal of Hospital Infection*, para ilmuwan yang menganalisis publikasi terkait Covid-19 untuk mendapat gagasan seberapa lama mereka dapat bertahan di luar tubuh inangnya. Mereka menemukan, virus ini dapat bertahan di permukaan selama lebih dari seminggu. Namun, beberapa dari mereka tidak aktif jika berada pada suhu di atas 30 derajat celsius.

Para peneliti juga menemukan fakta bahwa virus ini musnah oleh disinfektan dengan 62-71% ethanol, 0,5% hidrogen peroksida atau 0,1% natrium hipoklorit. Disinfektan itu secara efektif 'menonaktifkan' virus corona dalam satu menit. Meski begitu, peneliti mengatakan, masih belum jelas seberapa lama tangan dapat terkontaminasi virus corona setelah menyentuh pasien yang sakit atau permukaan dengan virus tersebut.



LAKUKAN TINDAKAN PENCEGAHAN

social
dis-
tance-
ing



Cegah Covid-19 di Satuan Pendidikan

Menurut data WHO, sampai Maret 2020, virus ini telah menyebar cepat ke lebih dari 100 negara dan menginfeksi ratusan ribu orang di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Kondisi ini menjadi alasan bagi WHO untuk menetapkan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi global. Di tengah kondisi ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mencegah meluasnya penyebaran virus ini di Indonesia.

Di ranah pendidikan upaya pencegahan juga dilakukan. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan beberapa kepala daerah di Jawa yang menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama setidaknya dua pekan. Kemendikbud pun telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 di satuan pendidikan. Melalui surat edaran tersebut, Mendikbud Nadiem Makarim mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19. "Kita bergerak bersama untuk bisa lepas dari situasi ini," kata Mendikbud.

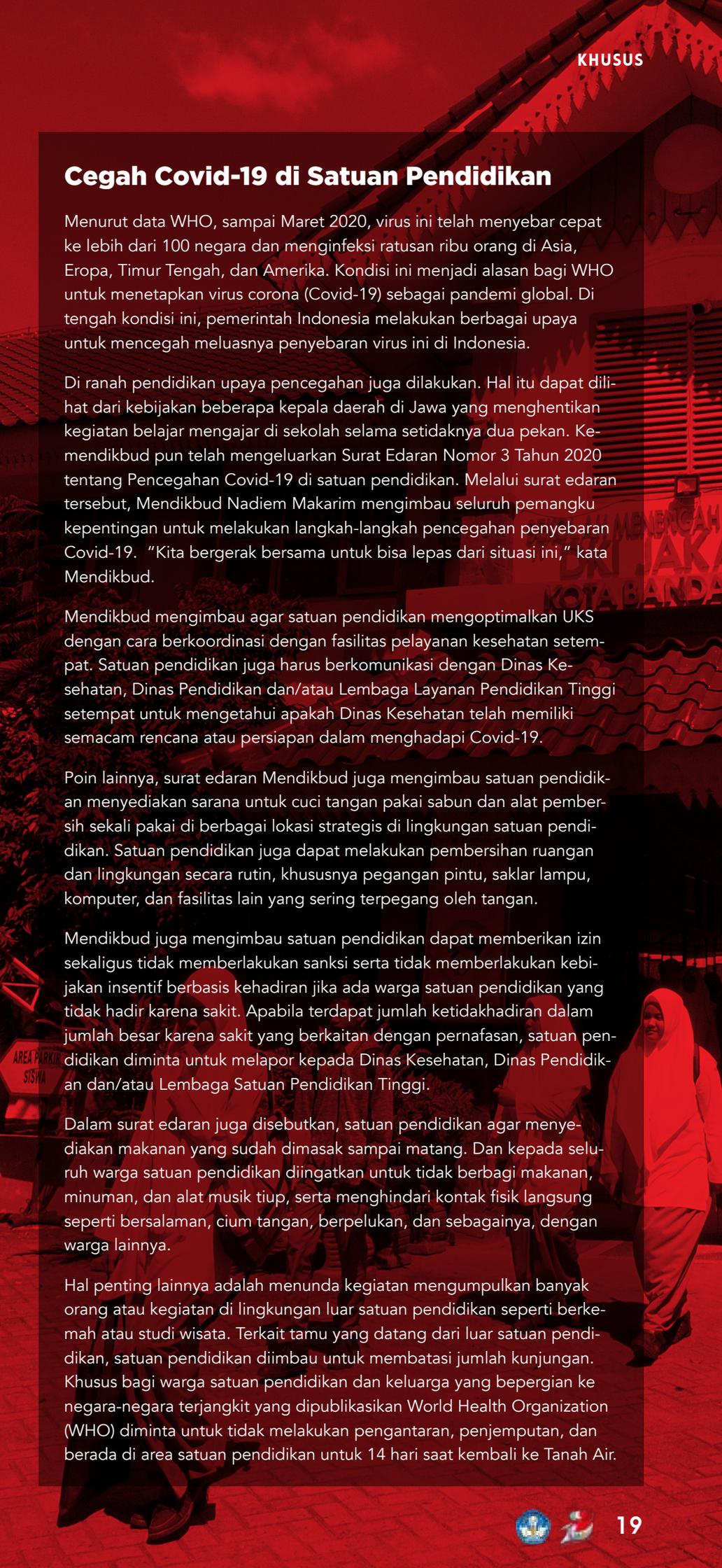
Mendikbud mengimbau agar satuan pendidikan mengoptimalkan UKS dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Satuan pendidikan juga harus berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki semacam rencana atau persiapan dalam menghadapi Covid-19.

Poin lainnya, surat edaran Mendikbud juga mengimbau satuan pendidikan menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun dan alat pembersih sekali pakai di berbagai lokasi strategis di lingkungan satuan pendidikan. Satuan pendidikan juga dapat melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan secara rutin, khususnya pegangan pintu, saklar lampu, komputer, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.

Mendikbud juga mengimbau satuan pendidikan dapat memberikan izin sekaligus tidak memberlakukan sanksi serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran jika ada warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit. Apabila terdapat jumlah ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan, satuan pendidikan diminta untuk melapor kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Satuan Pendidikan Tinggi.

Dalam surat edaran juga disebutkan, satuan pendidikan agar menyediakan makanan yang sudah dimasak sampai matang. Dan kepada seluruh warga satuan pendidikan diingatkan untuk tidak berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup, serta menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya, dengan warga lainnya.

Hal penting lainnya adalah menunda kegiatan mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan seperti berke-mah atau studi wisata. Terkait tamu yang datang dari luar satuan pendidikan, satuan pendidikan diimbau untuk membatasi jumlah kunjungan. Khusus bagi warga satuan pendidikan dan keluarga yang bepergian ke negara-negara terjangkit yang dipublikasikan World Health Organization (WHO) diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke Tanah Air.



Mencegah Tertular Covid-19

Sampai saat ini belum ada vaksin spesifik untuk mengobati infeksi virus corona. Namun, gejala yang disebabkan oleh virus ini dapat diobati. Oleh karena itu pengobatan harus didasarkan pada kondisi klinis pasien. Perawatan suportif diyakini dapat sangat efektif. Selain itu, tentu saja melakukan upaya pencegahan jauh lebih baik. Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah tertular virus corona:

- Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih.
- Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci.
- Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit.
- Hindari menyentuh hewan atau unggas liar.
- Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan.
- Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian, buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih.
- Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit.
- Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas.



Lakukan ini Bila Merasa Sakit

Kementerian Kesehatan mengeluarkan protokol kesehatan terkait virus corona.

Jika Anda merasa tidak sehat, dengan gejala demam 38 derajat celcius, dan mengalami batuk atau pilek, maka disarankan melakukan hal berikut:

1. Istirahat yang cukup di rumah bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernapas (sesak/napas cepat),
2. segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyan-kes).

Saat berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan, yang perlu Anda lakukan adalah:

- Gunakan masker. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar. Caranya yaitu dengan menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan.
- Usahakan tidak menggunakan transportasi massal.
- Kunci melawan virus corona adalah imunitas atau kekebalan tubuh. Oleh karena itu, penting menjaga kondisi tubuh, di antaranya dengan asupan makanan bergizi dan istirahat yang cukup.



Memerdekakan Sekolah Melalui MBS



Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah salah satu model manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mandiri baik dalam pengelolaan maupun metode pembelajaran.



Merdeka sekolah bukan lagi hanya sebatas impian. Kini, melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), satuan pendidikan dapat menentukan arah dan kebijakannya secara mandiri. Artinya, sekolah memiliki keleluasaan dan otonomi luas untuk mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat.

Pola baru manajemen pengelolaan sekolah ini diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan zaman yang lebih bernuansa otonomi dan demokratis. Pengalaman telah membuktikan tentang lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional. Menengok ke belakang. Dulu, warga sekolah, baik kepala sekolah dan guru memiliki pandangan dalam mengelola sekolah harus sesuai dengan arahan dan kebijakan instansi di atasnya. Walhasil, lahir sekolah yang kurang kreatif dalam menciptakan proses belajar mengajar dan kurang melibatkan masyarakat.

Pola-pola lama seperti pengambilan keputusan harus terpusat, di era merdeka sekolah ini pengambilan keputusan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan. Hal ini karena pendekatannya tidak lagi birokratis tapi lebih ke arah profesional sehingga ruang gerak menjadi luwes, tidak kaku lagi. Kebijakan yang dijalankan juga lebih desentralistik serta memberikan fasilitas seluasnya bagi pengembangan pendidikan melalui pemberdayaan banyak pihak. Dari sini akan tercipta tim kerja yang *solid* serta transparan baik dalam pengelolaan sumber dana seefisien mungkin maupun dalam hal pengawasan.

Manajemen Berbasis Sekolah atau disingkat MBS merupakan istilah yang banyak diungkap dalam dunia pendidikan. Istilah MBS atau *School Based Management* mulai berkembang di Amerika Serikat sebagai dampak dari tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Dengan kondisi itu, maka setiap sekolah dituntut untuk mengelola sendiri aktivitas satuan pendidikannya dan tidak

sempurnya bergantung pada pemerintah. Sekolah diberi kewenangan untuk mengelola sendiri kondisi sumberdaya yang ada di sekolahnya sehingga dapat menghasilkan *outcome* yang memiliki relevansi bagi kehidupan nyata.

Melalui MBS, kewenangan dalam pengelolaan sekolah, bertumpu kepada sekolah dan *stakeholder* terkait langsung. Dengan basis ini, fungsi manajemen sekolah lebih terbuka dan optimal, menghindari format sentralisasi dan birokratisasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi manajemen sekolah. MBS juga didasarkan pada kenyataan bahwa setiap sekolah, layaknya setiap individu, memiliki keunikannya sendiri. Setiap sekolah memiliki karakteristik yang tidak dimiliki sekolah lain. Setiap sekolah memiliki konteks dan kondisi lokal yang berbeda satu dengan yang lain.

Di Indonesia konsep ini muncul pertama kali pada tahun 2000. Secara resmi konsep ini tertuang dalam dokumen Undang-undang No. 25 Tahun 2000 Rencana Strategis Pembangunan Nasional tahun 2000-2004, selanjutnya tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 51 UU Sistem Pendidikan Nasional tercantum bahwa "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah." Di sini jelas bahwa Manajemen Berbasis Sekolah merupakan prinsip dalam pengelolaan satuan pendidikan.

Ruang Lingkup MBS

Melalui MBS, pihak manajemen sekolah diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri dalam berbagai hal. Berhasil tidaknya sebuah sekolah dalam menjalankan proses pendidikan sepenuhnya tergantung pada manajemen sekolah. Ibarat pengendara mobil

di jalan, dia lah yang menentukan berapa kecepatan dan arah jalannya. Tentu, ada manual yang menjadi *guidance* bagaimana caranya mengendalikannya. Bagaimana cara dia membawa kendaraan, sepenuhnya tanggungjawabnya.

MBS memiliki ruang lingkup yang luas meliputi berbagai aspek:

1. MBS merupakan otonomi satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan. Dalam hal ini, kepala sekolah dan guru dibantu komite sekolah dalam mengelola pendidikan.
2. Kewenangan kepala sekolah untuk menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi rencana strategis dan operasional, struktur organisasi dan tata kerja, sistem audit dan pengawasan internal, dan sistem penjaminan mutu internal.

Terkait dengan penerapan MBS di sekolah, memang belum ada bentuk atau pedoman yang baku. Sepanjang prinsip-prinsipnya dijalankan, pihak sekolah boleh saja mencari konsep yang tepat sesuai dengan kebutuhan setempat.

Tentang penerapan sistem MBS di SMA, banyak contoh pengalaman yang dapat dijadikan panduan bagi sekolah lain. Salah satunya adalah SMAN 7 Kota Jambi. Sekolah yang berdiri pada tahun 1984 ini, kreatif mengelola lahan kosong di area sekolah dengan melakukan pembudidayaan jagung, pepaya, melon dan sayuran lainnya. "Kebetulan lahan pertanian kami sangat luas. Jadi kami manfaatkan sebaik mungkin," ujar Wakil Kepala Sekolah SMAN 7 Kota Jambi, Ubaidillah.

Tak heran, bila SMAN ini pada tahun 2018 kembali ditunjuk sebagai sekolah kewirausahaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Pertimbangannya,

SMAN 7 dinilai mampu mengembangkan potensi lokal di lingkungan sekitar sekolah. Sekolah juga dinilai memiliki nilai jual serta potensi pemasaran yang mumpuni. Sekolah yang mendapat julukan 'Serambi Mekah' Kota Jambi ini telah menerima guyruran dana bantuan senilai Rp100 juta untuk pengembangan sekolah kewirausahaan. Bantuan dana tersebut digunakan dalam bentuk beragam kegiatan antara lain sosialisasi, pendampingan, membuat produk kerajinan ataupun makanan yang bernuansa lokal. Untuk kegiatan sosialisasi dan pendampingan, pihak sekolah mendatangkan pemateri berpengalaman di bidangnya.

Gebrakan kewirausahaan yang dilakukan pihak sekolah, adalah bagian dari implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui pemanfaatan sumber daya yang ada sekaligus dapat dijadikan proses pembelajaran. Tak hanya piawai dalam mengelola usaha terkait bidang pertanian, sekolah juga memiliki usaha dalam bidang kerajinan lokal, seperti kerajinan batik khas Jambi. Bentuknya beragam, mulai dari cinderamata, hiasan rumah, hingga kerajinan lainnya dengan memanfaatkan barang yang ada di lingkungan sekitar. Pihak sekolah berupaya terus fokus mengembangkan batik menjadi produk yang akan dipasarkan. ●

Dengan basis ini, fungsi manajemen sekolah lebih terbuka dan optimal, menghindari format sentralisasi dan birokratisasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi manajemen sekolah.

Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana

Sarana dan prasarana merupakan hal penting yang harus dimiliki sekolah dengan kualitas baik dan kuantitas yang memadai, dengan begitu sekolah diharapkan akan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang prima.

Seiring berjalannya waktu, bangunan sekolah tentu akan mengalami penurunan keandalan dan nilai estetika. Penurunan keandalan ini dapat diakibatkan oleh pola penggunaan bangunan, kondisi cuaca, dan perubahan fungsi ruang. Kondisi sekolah yang menurun keandalannya akan berpengaruh pada performa fungsi bangunan. Selain itu, semakin bertambahnya umur suatu bangunan tentu akan berpengaruh pada nilai estetikanya, maka perlu juga dilakukan pembaruan sesuai dengan perkembangan arsitektur lingkungan.

Pada tahun 2019, Direktorat Pembinaan SMA (kini Direktorat SMA) memberikan bantuan renovasi bangunan sebanyak 100 paket dengan nilai total bantuan Rp 50 Milyar. Renovasi dilakukan terhadap ruang pembelajaran, ruang fungsi kantor, dan ruang penunjang yang menjadi bagian dari bangunan sekolah. Proses pembangunan dilakukan swakelola oleh sekolah menggunakan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Kriteria dan Prinsip Bantuan

Bantuan renovasi ini diberikan kepada sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penerima bantuan, kriteria sekolah yang penerima bantuan adalah: (a) Usia bangunan SMA telah lebih dari 20 tahun; (b) Semua bagian bangunan sekolah dapat direnovasi, (c) Lingkup kegiatan renovasi bangunan sekolah (terdapat dalam panduan), (d) Sekolah yang mengalami musibah (kebakaran, bangunan runtuh, kerusakan, dll) atau terkena bencana alam (rob, gempa, banjir, longsor, dll); (e) Sekolah yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).



Dalam prosesnya, bantuan ini memiliki beberapa prinsip yang melekat, diantaranya adalah:

- (a). Partisipatif, dimana pengelolaan bantuan sepenuhnya dilakukan oleh sekolah dan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi aktif.
- (b). Transparan, pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara terbuka dan transparan
- (c). Akuntabel, pengelolaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas, kuantitas pekerjaan, maupun penggunaan keuangan, sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
- (d). Efektif dan Efisien, pemanfaatan dana bantuan harus efektif dan efisien.

Proses penyaluran bantuan sendiri diberikan dalam dua tahap. Tahap satu (70%), disalurkan setelah penandatanganan SP2D dan kuitansi penyaluran dana bantuan tahap satu. Sementara tahap dua (30%) disalurkan setelah penandatanganan kuitansi penyaluran dana tahap dua dan penyampaian laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan pembangunan mencapai 50%. Sementara itu, transfer dana dilakukan melalui bank terpilih melalui rekening giro sekolah penerima bantuan.

Selain menghadirkan wajah baru sekolah dengan arsitektur terkini dan memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta didik untuk belajar, melalui program ini juga diharapkan dapat memperbaharui semangat dan kinerja sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan yang prima bagi peserta didik, dan membuat peserta didik menjadi lebih nyaman belajar di sekolah. Melalui bantuan yang diberikan untuk sekolah-sekolah di daerah 3T juga diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pemerataan pendidikan di Indonesia, karena bangunan sekolah yang bagus dan kokoh bukan hanya hak sekolah di perkotaan dan sekolah yang dekat saja, tetapi juga hak sekolah di daerah 3T. Semoga! ●

RENOVASI
SMA



Bangunan-bangunan SMA yang direnovasi melalui program Direktorat SMA





Hapus UN, Dorong Merdeka Belajar

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) mulai tahun ajaran 2020 dan menggantikannya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Penyelenggaraan UN tahun 2021 diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri atas kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Menurut Nadiem, arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Menurut Nadiem, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang selama ini diselenggarakan melalui pilihan ganda dinilai tidak optimal dalam mengukur kompetensi dasar yang dimiliki oleh siswa. Ini menjadi salah satu alasan Mendikbud mengembalikan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) kepada sekolah.

“USBN akan dikembalikan pada esensi

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yakni dikembalikan ke sekolah. Termasuk untuk menentukan kelulusannya sendiri,” ujar Nadiem Makarim.

Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilaku-

kan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif. Seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). Pelaksanaan ujian tersebut dilakukan oleh siswa yang berada di jenjang sekolah seperti kelas 4, 8 dan 11. Sehingga, asesmen dan survei itu dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.

Dengan kebijakan ini, kata Nadiem, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran. “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik, baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” tutur Mendikbud.

Meski demikian, Nadiem tidak memaksa sekolah untuk menerapkan perubahan pola USBN tersebut pada tahun ini. “Kalau mau menggunakan format USBN yang lama dipersilahkan, tapi yang melakukan perubahan atau melakukan penilaian yang dilakukan secara holistik maka diperbolehkan,” ungkap dia.

Nadiem memberikan kesempatan pada para guru untuk mengambil kesempatan tersebut, dengan melakukan perubahan pada pola USBN. Dia juga meminta agar kesempatan tersebut tidak disia-siakan. “Bagi kepala dinas yang sudah menganggarkan dananya untuk USBN, bisa digunakan untuk peningkatan kapasitas guru,” ucap dia.





Ujian Nasional dari Masa ke Masa

Penyelenggaraan Ujian Nasional telah dilaksanakan sejak 1945 dan terus mengalami perubahan istilah, seperti ditulis pada Laman Puspendik Kemendikbud :

Sekolah Selenggarakan Ujian

Kepala Badan Nasional Pendidikan (BNSP) Abdul Mu'ti menyebut dengan adanya penghapusan USBN tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 43/2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional yang ditandatangani Mendikbud pada 10 Desember 2019, BSNP tidak lagi membuat rujukan untuk USBN karena pembuatan soal maupun penyelenggaraan USBN diserahkan sepenuhnya kepada sekolah.

Abdul Mu'ti juga mengingatkan sudah tersedianya ketentuan teknis pelaksanaan ujian sekolah pada Permendikbud No.53/2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pada Permendikbud itu juga sudah memiliki acuan teknisnya berupa petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Aturan itu dapat dijadikan pegangan bagi sekolah untuk melaksanakan ujian sekolah.

Abdul menambahkan, meski dengan hilangnya kewenangan BNSP tersebut, ujian tetap dilaksanakan menggunakan komputer. Sekalipun menggunakan kertas pensil, sekolah penyelenggara ujian harus meminta persetujuan dari BSNP terlebih dahulu. "Berdasarkan evaluasi kami, memang UNBK (ujian nasional berbasis komputer) memberikan akurasi yang lebih baik dan juga dalam pelaksanaannya lebih efisien," katanya.

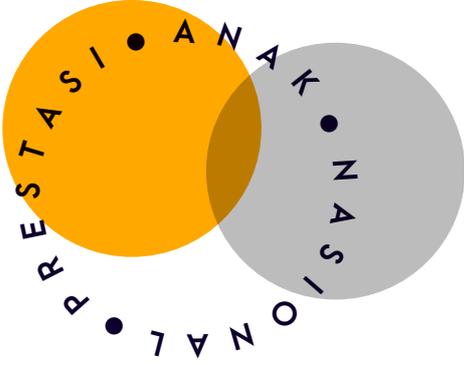
1. Ujian Penghabisan (1950 - 1964) Ujian akhir yang bersifat nasional dimulai sejak tahun 1950, pada periode ini sampai tahun 1964 ujian kelulusan disebut Ujian Penghabisan dan diadakan secara nasional.
2. Ujian Negara (1965 - 1971) Sistem ujian akhir yang diterapkan disebut Ujian Negara. Tujuannya adalah untuk menentukan kelulusan, sehingga siswa dapat melanjutkan ke sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri apabila telah lulus Ujian Negara. Sedangkan bagi yang tidak lulus Ujian Negara tetap memperoleh ijazah dan dapat melanjutkan ke sekolah atau perguruan tinggi swasta.
3. Ujian Sekolah (1972 - 1979) Ujian Negara berganti menjadi Ujian Sekolah. Tujuan ujian adalah untuk menentukan peserta didik tamat atau telah menyelesaikan program belajar pada satuan pendidikan. Seluruh bahan ujian disiapkan oleh sekolah atau kelompok sekolah. Mutu soal sangat bervariasi, tergantung mutu sekolah/kelompok sekolah.
4. Ebtanas dan Ebta (1980 - 2002) Istilah ujian nasional kembali menjadi Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional atau Ebtanas (untuk mata pelajaran pokok) dan Ebta (untuk mata pelajaran non-Ebtanas). Tujuan dari Ebtanas dan Ebta adalah untuk memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Pada awal diberlakukan mata pelajaran yang diujikan adalah Pendidikan Moral Pancasila, kemudian pada tahun berikutnya ditambah dengan beberapa mata pelajaran lainnya.
5. Ujian Akhir Nasional (2003-2004) Pergantian istilah kembali terjadi Ebtanas diganti menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN). Tujuan UAN adalah untuk (a) menentukan kelulusan, (b) pemetaan mutu pendidikan secara nasional, (c) seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bahan mata pelajaran yang diujikan terdiri atas tiga mata pelajaran yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan dengan menggunakan soal-soal dari Bank Soal Nasional. Sementara untuk mata pelajaran lainnya disiapkan oleh sekolah atau daerah dengan menggunakan Standar Kompetensi Lulusan dan Panduan Materi dari Puspendik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan UAN. ●



PUSAT PRESTASI NASIONAL

Wadah Prestasi Anak Indonesia





Setiap peserta didik memiliki keistimewaan masing-masing dan berpotensi memiliki prestasi dalam bidang yang berbeda, dibutuhkan wadah khusus untuk mengumpulkan berbagai prestasi yang dimiliki peserta didik.

Aneka kebijakan baru mewarnai awal tahun 2020, seiring dengan dilantikannya Menteri pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi sekarang, tidak terkecuali di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setidaknya terdapat empat lembaga baru yang dibentuk oleh Nadiem Makarim selaku Mendikbud. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Pusat Prestasi Nasional.

Pembentukan Pusat Prestasi Nasional ini, bertujuan mengakomodir anak-anak yang berbakat. Tugas pusat prestasi lebih jauh adalah mengadakan dan menilai beragam jenis perlombaan, aktivitas ekstrakurikuler, olahraga, dan lainnya. Menurut Mendikbud, Nadiem Makarim lembaga ini akan berfungsi sebagai manajemen talenta bagi anak muda Indonesia.

Masih menurut Mendikbud, berbagai aktivitas di Pusat Prestasi Nasional ini akan mendorong penguatan karakter anak-anak Indonesia. Selain itu juga untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan Indonesia.

Partisipasi dan capaian peserta didik dalam beragam ajang lomba yang diselenggarakan akan masuk pada portofolio. Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa portofolio diri kini menjadi hal yang penting dan dapat digunakan baik untuk kepentingan kelanjutan akademik maupun di dunia kerja nantinya.

Melalui Pusat Prestasi Nasional juga, negara hadir mengawal keberlanjutan prestasi peserta didik yang memiliki potensi. Pusat ini juga yang kemudian akan melakukan kurasi terhadap prestasi siswa. Keberadaan Pusat Prestasi Nasional juga mengakomodir berbagai lomba dari jenjang SD hingga SMA/SMK, bahkan termasuk pendidikan khusus dan pendidikan tinggi. Sebelum ada Pusat Prestasi Nasional, lomba diakomodir di Direktorat masing-masing, misalnya di Direktorat PSMA (kini Direktorat SMA), sebelumnya menangani lomba, bakat, dan prestasi peserta didik SMA dibawah kewenangan Sub Direktorat Peserta Didik, namun dengan dibentuknya Pusat Prestasi Nasional, lomba menjadi terpusat di satu lembaga. Dengan adanya Pusat Prestasi Nasional dan lembaga lainnya yang dibentuk, Direktorat menjadi lebih fokus memikirkan peningkatan mutu pendidikan. ●

W A D A H P R E S T A S I A N A K
P U S A T P R E S T A S I N A S I O N A L





SMA NEGERI 4 KOTA BANDA ACEH

Lebih Optimal Belajar Digital



Dengan keterbatasan sekolah menyiasati untuk memulai pelayanan pendidikan berbasis digital. Meskipun belum sepenuhnya, namun langkah ini menjadi yang pertama di Banda Aceh.



Butuh keberanian untuk memulai hal baru. Inilah yang menjadi modal pengelola SMA Negeri 4 Banda Aceh untuk memulai penerapan teknologi digital dalam layanan pendidikannya. Tercatat, sejak 2017 sekolah ini menjadi sekolah pertama di Banda Aceh yang menerapkan teknologi digital untuk penyelenggaraan ujian.

Baik ujian sekolah maupun ujian nasional sudah menggunakan sistem daring dengan menggunakan komputer dan gawai berbasis android. Selain ujian, proses pembelajaran di kelas juga sudah memanfaatkan perangkat gawai pintar yang terhubung melalui wifi sekolah. Beberapa laman pembelajaran berbasis daring seperti Ruang Guru, Rumah Belajar, juga sudah dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran.

Bachtiar, Kepala SMA Negeri 4 Banda Aceh mengungkapkan, kebijakan ini lebih dilatarbelakangi oleh perkembangan yang terjadi saat ini terutama berkaitan dengan teknologi digital. Menurutnya, keseharian anak saat ini hampir tak dapat dilepaskan dari gawai pintar. Pun kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan yang arahnya memang akan lebih fokus pada pemanfaatan teknologi.

Kebijakan ini membuat siswa yang menimba ilmu di sekolah ini antusias mengikuti pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet. Beberapa guru mengaku, siswanya nyaris selalu asyik dan antusias mengikuti jalannya pembelajaran sampai jam pelajaran usai tanpa pernah meninggalkan ruang kelas. Padahal, bila menggunakan metode lama seperti berceramah menjelaskan isi buku, seringkali siswa mengantuk atau silih berganti izin keluar kelas.

Kondisi ini dibenarkan Arif Syahdan, siswa kelas XI. Ia mengaku senang ketika guru yang mengajar di kelasnya menggunakan metode pembelajaran berbasis digital. Menurutnya ada beberapa pilihan yang biasa diberikan, menggunakan proyektor untuk mengikuti materi pembelajaran berupa multimedia yang telah dibuat oleh guru mata pelajaran atau menggunakan gawai pintar dan bersama-sama mencari sumber pembelajaran.

Metode semacam ini, bukan saja memudahkan untuk mencerna materi pelajaran, juga mampu membuat suasana pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. "Pembelajaran model ini sangat menyenangkan, kami lebih cepat memahami materi dan banyak sumber yang bisa kami cari, tapi ya itu, godaannya juga cukup besar. Ada kalanya, pas lagi belajar kita buka-buka *game* atau main media sosial," ungkapny.

Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Keterbatasan

Sentuhan digital pada layanan pendidikan yang diberikan sekolah, terbukti menghadirkan bukan hanya kemudahan dalam pembelajaran. Namun seperti diakui Bachtiar, penerapan teknologi digital dalam proses layanan pendidikan di sekolahnya belum maksimal. Untuk saat ini sekolahnya memang belum siap sepenuhnya untuk menerapkan sekolah digital. Belum siapnya sarana dan prasarana menjadi salah satu penyebab. Jumlah komputer yang dimiliki baru sebanyak 140 unit tidak mencukupi untuk dapat digunakan oleh 24 rombel secara bersamaan. Pun ketersediaan jaringan internet yang tidak dapat digunakan secara bersamaan. "Kita masih harus bergiliran menggunakan komputer maupun internet. Pertama komputer kita jumlahnya belum mencukupi, kedua jaringan internet kita kalau digunakan bersamaan, kecepatannya berkurang drastis," ujar Bachtiar.

Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tak menghalangi sekolah ini untuk menerapkan digitalisasi pada proses pembelajaran. Untuk menyasati keterbatasan komputer, pihak sekolah mendaftarkan jumlah siswanya yang memiliki gawai pintar. Hasilnya, hanya puluhan siswa yang tak memiliki. Gawai pintar milik siswa inilah yang kemudian digunakan untuk mengampu pembelajaran berbasis digital.

"Kami tidak pernah memaksa siswa untuk memiliki gawai pintar. Namun nyatanya orangtua mereka mendukung kebijakan kami, buktinya mereka tidak ada yang melakukan protes, bahkan sebaliknya tanpa kami minta menyediakan laptop untuk anaknya, sebagian lagi berlangganan aplikasi pembelajaran secara mandiri," ungkap Bachtiar.

PROFIL

Selain kendala yang disebabkan keterbatasan jumlah komputer dan kecepatan akses internet, masih ada kendala lainnya yang dihadapi SMA Negeri 4 Banda Aceh. Kendala itu berasal dari kesiapan guru. Belum semua guru yang mengajar di sekolah ini, mampu menerapkan pembelajaran digital. Dari jumlah guru sebanyak 51 orang dengan usia antara 38 s.d. 55 tahun. Hanya 25 persen di antaranya yang menguasai atau familiar menggunakan IT.

"Pembelajaran dengan sentuhan digital membuat anak-anak lebih bersemangat ketimbang dengan metode ceramah, oleh karena itu guru-guru kita imbau untuk menggunakan pembelajaran dengan digital namun kemampuan guru kita beragam. Masih ada guru yang tidak nyaman menggunakan pola baru yang menggunakan teknologi," ujarnya.

Penerapan teknologi digital terbukti selain efektif dalam menyajikan pembelajaran

yang menyenangkan bagi peserta didik, juga dari sisi anggaran mampu menghemat penggunaan kertas. Pun meringankan tugas guru, karena dengan memanfaatkan teknologi, mereka bisa langsung mengetahui hasil pekerjaan mereka dan juga anak didik mereka. Melihat manfaat yang dihasilkan oleh pembelajaran berbasis digital di sekolah yang ia pimpin, Bachtiar berencana meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan sekolah digital. Selain menambah perangkat komputer, ia juga berencana memperkuat jaringan internet di sekolahnya. ●

1. *Etalase kerajinan tangan karya peserta didik.*
2. *Aktivitas peserta didik di laboratorium sekolah.*
3. *Bangunan dan suasana SMAN 4 Banda Aceh.*







Membuka Kesempatan yang Sama untuk Semua Siswa

SMAN 5 Semarang siap menerima siswa tanpa melihat latar belakang melalui sistem zonasi. Dengan sistem ini semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pendidikan berkualitas.





Pendidikan berkualitas kini bukan hanya bisa dinikmati oleh anak yang bersekolah di sekolah yang menurut penilaian masyarakat masuk kategori sekolah unggulan atau favorit. Hal ini bisa terwujud setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tentu saja kebijakan ini menjadi berita bahagia bagi siswa yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah favorit tapi apa daya hanya bisa melihat bangunan gedungnya saja karena NEM-nya tidak memenuhi standar penerimaan di sekolah tersebut.

Sementara dari sisi satuan pendidikan, apapun regulasi yang digulirkan pemerintah sepanjang untuk kepentingan peserta didik, akan patuh mengikuti. Seperti yang dialami SMAN 5 Semarang yang selama ini dianggap sebagai salah satu sekolah favorit di Ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Posisi SMA Negeri 5 Semarang serba menguntungkan. Lokasinya strategis, di Jalan Pemuda No. 143 yang berada di jantung Kota Semarang ditambah sarana-prasarana ditata secara menarik dan cukup representatif untuk kegiatan proses pembelajaran. Peserta didik yang berminat belajar di SMA Negeri 5 Semarang juga umumnya memiliki kemampuan akademik baik. Inilah yang kemudian menjadikan SMA Negeri 5 Semarang sebagai salah satu sekolah pilihan bagi calon siswa dan orang tua di antara sekian sekolah favorit di Semarang. Keberadaan seperti ini tidak datang dengan sendirinya melainkan melalui proses panjang dan penuh perjuangan dari seluruh satuan pendidikan di sekolah ini.

Belakangan, tepatnya sejak tahun 2017, untuk menjadi siswa SMA Negeri 5 Semarang tak lagi harus melalui seleksi masuk berdasarkan NEM. Siapapun memiliki kesempatan untuk bisa bersekolah di sini, setelah keluarnya kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018, menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Di dalam pasal 16 disebutkan bahwa

sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

Selain itu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima serta jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Semarang, Dr. Siswanto mengatakan bahwa satuan pendidikan di bawah pimpinannya mendukung sepenuhnya sejak regulasi itu digulirkan. Karena konsep zonasi dinilai sebagai upaya pemerintah dalam menjamin pemerataan dalam pelayanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan. Sejauh mana pelaksanaannya, ketika regulasi/ketentuan itu disahkan, dan sesuai dengan Peraturan Gubernurnya. Semua satuan pendidikan di Jawa Tengah benar-benar tunduk pada aturan. "Apalagi tujuannya bagus, untuk pemerataan akses layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan tanpa diskriminasi," ungkapnya.

Hal ini sejalan dengan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No.17 tahun 2010 juncto No. 66 tahun 2010 di mana pada Pasal 49 No. 2e disebutkan bahwa satuan pendidikan harus memiliki akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian. Serta pada Pasal 53 di mana satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan



kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi. Bahkan bagi peserta didik yang kurang mampu, ada lagi regulasi yang mengaturnya. Pada pasal 19, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mengamanatkan sekolah yang dikelola pemerintah daerah untuk mengalokasikan tempat (kuota) dan membebaskan biaya untuk peserta didik dari kalangan keluarga tidak mampu, sebesar minimal 20% persen kepada peserta didik dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Diharapkan, hal ini dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah atau anak tidak sekolah (ATS) di masyarakat.

Berdasarkan regulasi tersebut, satuan pendidikan SMA Negeri 5 Semarang langsung gencar mensosialisasikan sistem zonasi kepada pendidik, tenaga kependidikan, orang tua serta Komite Sekolah dalam berbagai kesempatan. Pada saat upacara, rapat dinas sampai pengarahannya. Meski sudah dilakukan sosialisasi, menurut Siswanto yang sudah menjadi Kepala Sekolah selama empat tahun, masih saja ada yang belum memahami sepenuhnya konsep zonasi ini. "Umumnya mereka hanya mengetahui konsep zonasi terkait dengan PPDB saja yang didasarkan pada zona tempat tinggal. Itu pun masih banyak yang salah paham. Padahal esensi zonasi adalah pemerataan layanan dan kualitas pendidikan melalui guru, tenaga kependidikan sampai sarana prasarana."

Kesalahpahaman yang terjadi biasanya bersumber dari orang tua siswa yang belum memahami sistem zonasi PPDB. Misalnya, ada calon siswa yang tidak bisa diterima karena secara zonasi tidak masuk di sekolah ini namun di kecamatan tempat dia tinggal juga tidak ada sekolah atau jauh dari sekolah. Atau lokasi di sekitar sekolah merupakan daerah padat penduduk sementara daya serap tidak mampu menampung. Untuk masuk melalui jalur lain seperti prestasi juga kecil kemungkinannya. "Inilah kendala sistem zonasi kita yang perlu diantisipasi lagi ke depannya. Jadi masih perlu

pembenahan," kata Kepala Sekolah SMAN 5 Semarang yang asalnya guru mata pelajaran Fisika. Terutama perlunya memfasilitasi peserta didik yang di wilayahnya tidak memiliki sekolah atau jauh dari sekolah serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa yang berprestasi tetapi tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Begitu juga dari segi peminatan yang sudah diseleksi oleh sistem pada awal pendaftaran. Ada siswa yang berdasarkan nilainya, secara sistem masuk ke jurusan IPA padahal yang bersangkutan ingin masuk ke IPS atau sebaliknya, sulit untuk diakomodasi. Jika pun pada perjalanannya siswa mengambil program lintas peminatan, harus dilihat ketersediaan guru sesuai minat yang dipilih.



Aktivitas warga sekolah di perpustakaan dan lorong SMAN 5 Semarang

Pendekatan Personal Kepada Siswa

Terlepas dari masih adanya persoalan di sistem PPDB, menurut Siswanto, satuan pendidikan di SMAN 5 Semarang terus melakukan pembenahan ke dalam untuk memastikan semua peserta didik dapat terlayani dengan baik. Dari sisi guru, Kepala Sekolah mendorong agar mereka lebih kreatif lagi dalam mengajar, mengingat latar belakang siswa yang sangat heterogen.

“Sekolah harus menerima siswa dari berbagai latar belakang ekonomi, akademik dan kondisi psikologisnya. Dengan latar belakang yang beragam ini tentu permasalahan yang muncul juga beragam.”

Dengan adanya sistem zonasi pendidikan, menurut Rochimudin, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, para guru juga siap menjalankan tugas seperti biasa. Hanya mungkin akan ada penekanan dalam pola pengajaran saja. Maksudnya, bagi siswa yang memiliki pemahaman akademiknya bagus, guru mata pelajaran tinggal memberikan penguatan. Sebaliknya, bagi siswa yang perlu bimbingan, guru akan melakukannya. “Kami menggunakan pendekatan personal langsung ke siswa karena biasanya yang bermasalah itu bukan di guru melainkan di siswa,” tutur Rochimudin lagi.

Permasalahan siswa yang biasa muncul setelah diterapkannya sistem zonasi adalah soal karakter disiplin karena siswa berasal dari SMP yang kultur sekolahnya berbeda-beda. Di samping itu, kurang percaya diri karena latar belakang kemampuan akademik serta ekonomi. “Pada tahap awal, sulit sekali menumbuhkan rasa percaya diri anak, meskipun kami, baik melalui guru BK maupun wali kelas sudah melakukan berbagai upaya, semisal memberikan penguatan pada mata pelajaran yang masih kurang.” Namun secara bertahap akhirnya siswa dapat menyesuaikan diri dengan teman dan budaya sekolah. Sementara untuk membantu siswa yang berasal dari orang tua yang latar

belakang ekonomi kurang, sekolah memiliki kebiasaan menerapkan subsidi silang dan bersama siswa, kerap mengadakan penggalangan dana sosial melalui kegiatan yang dinamakan “Smala Charity”. Hasil penggalangan dana disalurkan bagi siswa yang membutuhkan dana untuk study tour atau membeli baju seragam sekolah.

Muhammad Haikal Firmansyah, siswa kelas X MIPA 9 SMAN 5 Semarang mengakui siswa-siswa di sekolah ini memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap teman yang kekurangan. Inilah salah satu dampak positif dari adanya sistem zonasi yang latar belakang siswanya sangat heterogen. “Selain itu saya setuju dengan sistem zonasi ini karena dapat meminimalisasi tingka keterlambatan siswa karena selain jarak antara rumah dan sekolah dekat dan transportasinya relatif mudah. Semoga SMAN 5 Semarang dapat mempertahankan keunggulan ini agar makin banyak calon siswa yang bisa bersekolah di sini,” katanya.

SMAN 5 Semarang dengan predikat Akreditasi A berdiri pada tahun 1964 di gedung bekas sekolah anak-anak keturunan Tionghoa, “Wha Ing” seluas 7.256 m² yang diambil oleh pemerintah setelah berhasil menumpas Gerakan 30 September. Awalnya gedung sekolah ini dimanfaatkan bersama oleh SMAN 5 Semarang dan IKIP Negeri Semarang (sekarang Universitas Negeri Semarang) dengan cara bergiliran dalam penggunaan ruang kelas karena hanya mempunyai 6 lokal. Sejalan dengan perkembangan waktu, sekolah ini terus berkembang sampai sekarang untuk membina 1.207 siswa dari jurusan MIPA dan IPS yang tergabung dalam 36 rombel dengan tenaga guru sebanyak 63 orang. Sekolah ini menerapkan Kurikulum 2013 dan menyediakan 38 jenis kegiatan ekstrakurikuler. ●



SMAN 2 PAYAKUMBUH, SUMBAR

Perpustakaan Digital di Kampus Flamboyan

Suasana yang nyaman dan layanan berbasis digital, perpustakaan SMAN 2 Payakumbuh menjadi ruang favorit bagi warga sekolah di luar jam belajar. Tak jarang meski jam kerja sudah habis, peserta didik masih asyik beraktivitas di perpustakaan.

DIGITAL • PERPUSTAKAAN

Menjelang pintu masuk perpustakaan, Kepala SMAN 2 Payakumbuh Irma Takarina tersenyum lebar melihat salah satu peserta didik yang tengah melepas sepatu dan hendak masuk ke perpustakaan. "Nah, ini Rahmat yang termasuk aktif berkunjung ke perpustakaan sekolah," ujar Irma seraya menyapa Rahmat Akbar yang dengan hormat memberi salam kepada kepala sekolah dan beberapa pengurus perpustakaan.

Menurut Irma, sejauh ini tingkat partisipasi peserta didik di perpustakaan SMAN 2 Payakumbuh yang telah berakreditasi A sangat tinggi. "Apalagi mereka yang masuk di kegiatan ekstrakurikuler penelitian atau

karya tulis. Belum lagi jika ada kajian pustaka yang diberikan oleh guru mata pelajaran, perpustakaan akan ramai pengunjung," jelasnya.

Rahmat saat dikonfirmasi menyatakan hal senada. Menurut siswa Kelas XII IPS 1 ini, ia dan kawan-kawannya berkunjung ke perpustakaan tiap hari. "Saya biasanya mencari buku ekonomi dan *leadership*, tapi kalau untuk kepentingan ekskul bergantung pada penelitian yang akan diangkat," ujar Rahmat yang menjadi anggota ekstrakurikuler penelitian ini.

Hal yang sama dikemukakan oleh Abdul Hamid, kelas XII MIPA 2. Menurut Hamid, ia kerap berkunjung ke perpustakaan baik untuk



Perpustakaan Digital SMAN 2
Payakumbuh, Sumbar

membaca maupun mengerjakan tugas atau berdiskusi bersama teman-temannya. "Di sini kami bisa mendapatkan banyak referensi sehingga sangat membantu dalam proses belajar. Kemudahan mendapatkan informasi juga sangat terasa dengan pelayanan berbasis digital yang berikan perpustakaan," kata Hamid.

Beragam layanan perpustakaan berbasis digital yang sangat memudahkan juga diakui Rahmat. Mulai dari pagi, menurut Rahmat, peserta didik sudah bisa mengakses informasi ke perpustakaan. "Penerapan layanan berbasis digital membuat peserta didik mendapatkan kemudahan, mulai dari pendaftaran yang cukup memindai kartu anggota atau cukup dengan memasukkan NISN, selanjutnya hanya cukup mengakses komputer perpustakaan untuk mencari buku yang kami butuhkan," papar Rahmat. Tak hanya itu, lanjutnya, jika ada buku yang dibutuhkan di luar koleksi perpustakaan, melalui fasilitas komputer di perpustakaan ia juga bisa mencari e-book dari aplikasi e-Perpusnas.

Dengan beragam layanan yang lengkap, tak jarang peserta didik betah berlama-lama di perpustakaan. Bahkan hingga melebihi jam operasional yang harusnya tutup pukul 16.00. Jika sudah demikian, sebagaimana dikemukakan Irma Takarina, sebagai kepala sekolah ia meminta petugas perpustakaan memberikan keleluasaan kepada peserta didik. "Jadi petugas harus memberikan kesempatan, meski harus pulang sore melebihi jam sekolah," kata Irma.

Di samping layanan, suasana perpustakaan sebagaimana suasana keseluruhan SMAN 2 Payakumbuh memang sangat nyaman. Sekolah yang berlokasi di Jalan Meranti No. 20 dan berada di kaki Bukit Sitabur, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, ini merupakan salah satu SMA di Sumbar yang memiliki kampus yang strategis dan indah. Kampusnya yang unik menepati sebagian hamparan dan kaki Bukit Sitabur yang dihiasi oleh pohon-pohon Flamboyan, sehingga warga SMAN 2 Payakumbuh menjulukinya "Kampus Flamboyan".



Untuk perpustakaan sekolah, selain telah memiliki Akreditasi A, SMAN 2 Payakumbuh juga sukses meraih kerjuaraan lomba perpustakaan baik di level Kota Payakumbuh, tingkat Provinsi Sumatera Barat, hingga di tingkat nasional. Dengan koleksi buku mencapai 20.000 judul, pada tahun 2018 untuk tingkat provinsi menduduki juara pertama dan tahun 2019 juara kedua.

“Untuk perpustakaan sendiri menempati posisi di bagian atas ke arah bukit. Jadi lebih nyaman. Ditambah perpustakaan menempati dua ruang sehingga sangat lapang dan tidak sumpek. Belum lagi udara yang sejuk menambah konsentrasi para pengunjung perpustakaan,” ujar Irma.

Pengelolaan Terfokus

Menjadikan perpustakaan sebagai pusat penyediaan bahan ajar dan sumber belajar di lingkungan SMAN 2 Payakumbuh memang menjadi salah satu fokus pengembangan sekolah yang dilakukan Irma. Karena itu, selain peningkatan layanan berbasis digital, menurut Irma, sekolah juga mempersiapkan pengelola yang berlatar belakang pustakawan.

Terkait petugas perpustakaan yang sesuai dengan kompetensinya, sejak tahun 2017, sebagai kepala sekolah Irma sudah mengangkat empat tenaga honorer yang fokus membantu kepala perpustakaan. “Penempatan mereka juga kami SK-kan sehingga akan fokus dalam mengelola perpustakaan,” jelasnya.



Lingkungan yang tampak hijau dan aktivitas peserta didik di perpustakaan SMAN 2 Payakumbuh, Sumatera Barat.





Hal senada juga diungkapkan oleh Drs. Afrizon, kepala Perpustakaan SMAN 2 Payakumbuh. Pengelolaan perpustakaan, menurut Afrizon, memiliki struktur kepala sekolah sebagai pelindung, kepala perpustakaan selaku koordinator, dan dibantu oleh beberapa staf, yakni bagian teknis, bagian pelayanan, dan bagian promosi.

“Secara operasional pengelolaan lebih terfokus dengan hadirnya para pengelola yang memang berlatar belakang sebagai pustakawan,” jelas Afrizon yang sudah 10 tahun dipercaya sebagai Kepala Perpustakaan SMAN 2 Payakumbuh dan memiliki sertifikasi pustakawan. Ia menambahkan, untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan meski berlatar belakang pustakawan, seluruh pengelola juga mendapatkan Bimtek. “Sementara anggaran perpustakaan ditanggung oleh organisasi induk yakni sekolah sesuai regulasi yang ada,” katanya.

Layanan Berbasis Digital

Dalam mengembangkan perpustakaan, selain pemenuhan petugas perpustakaan yang berkompetensi sebagai pustakawan, menurut Afrizon, juga dikembangkan sistem pengelolaan berbasis digital. Dalam konteks ini, perpustakaan SMAN 2 Payakumbuh mengimplementasikan aplikasi SLiMs.

Afrizon menjelaskan, aplikasi ini secara substansial mampu memberikan layanan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan perkembangan zaman yakni dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. “Proses digitalisasi yang diimplementasikan melalui SLiMs antara lain untuk pelayanan, pemrosesan, dan akses penelusuran. Dengan implementasi ini, tercipta kemudahan tak hanya bagi pustakawan tetapi juga pemustaka,” jelas Afrizon.

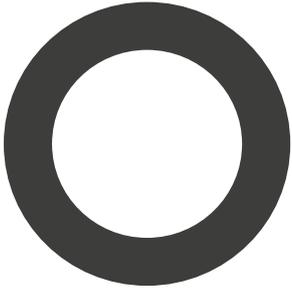
Langkah-langkah untuk mengimplementasikan sistem digital perpustakaan, lanjut Afrizon, dilakukan melalui kerja sama dengan perpustakaan yang telah menerapkan sistem digital, melengkapi sarana dan prasarana, mengadakan pelatihan petugas menuju perpustakaan digital, dan

bekerja sama dengan perpustakaan Politani Tj. Pati Payakumbuh terkait implementasi proses digital.

Sistem yang diimplementasikan di Perpustakaan SMAN 2 Payakumbuh adalah aplikasi SLiMs. Menurut Afrizon, sistem ini dipilih karena memiliki banyak fitur di antaranya pertama *Cataloging Module*, yakni fitur untuk membuat, mengedit, dan menghapus data bibliografi sesuai dengan standar deskripsi bibliografi, mendukung pengelolaan koleksi, mendukung penyimpanan data bibliografi dari situs di Internet, penggunaan *barcode*, hingga manajemen item koleksi. Kedua, Modul Penelusuran (*OPAC/Online Public Access catalog Module*). Melalui peralatan portabel (*mobile device*) yang bisa menampilkan informasi lengkap tentang status koleksi di perpustakaan, tanggal pengembalian, dan pemesanan item/koleksi. “Pada fitur ini juga tersedia *hyperlink* tambahan untuk pencarian lanjutan berdasarkan penulis dan subjek,” kata Afrizon.

Fitur lainnya dari aplikasi SLiMs, lanjut Afrizon adalah Modul Sirkulasi (*Circulation Module*) yang memproses peminjaman dan pengembalian koleksi secara efisien, efektif, dan aman. Mendukung fitur reservasi koleksi yang sedang dipinjam, termasuk reminder/pemberitahuannya. “Dari fitur ini kita juga bisa tahu koleksi apa saja yang paling sering dipinjam dan pemustaka yang teraktif,” jelasnya. Ia menambahkan, fitur lainnya yang tersedia melalui aplikasi SLiMs adalah Modul Manajemen Keanggotaan (*Membership Management Module*), Modul Inventarisasi Koleksi (*Stocktaking Module*), dan Modul Manajemen Terbitan Berseri (*Serial Control*).

Implementasi digital di Perpustakaan SMAN 2 Payakumbuh tersebut, sebagaimana diakui Kepala Sekolah Irma Takarina, belumlah mencapai seratus persen. “Namun kami terus memaksimalkan sistem digital untuk menjadikan perpustakaan tak hanya sebagai sarana meningkatkan prestasi peserta didik dan juga sekolah tetapi menjadi sumber belajar di era teknologi yang kian pesat,” jelasnya. ●



Ki Hajar Dewantara menjadikan pendidikan sebagai jalan perjuangan untuk melawan penjajah. Ia meletakkan dasar-dasar pendidikan Indonesia.



Ki Hajar Dewantara **Sang Guru Bangsa**

Raden Mas Soewardi Soeryaningrat lahir pada 1889. Ia putra Kanjeng Haryo Soeryaningrat, anak Paku Alam III (Gusti Hadipati Haryo Sastraningrat). Meski terlahir sebagai bangsawan, ia memilih berjuang melawan penjajah. Demi mendekatkan diri dengan rakyat, gelar kebangsawannya ia lepas pada usia 40 tahun dan menggantinya dengan nama Ki Hajar Dewantara.

Mengawali perjuangan dengan memilih bidang jurnalistik sebagai jalan perjuangan (ketika masih bernama Soewardi), mula-mula ia bekerja di harian *Sedio Tomo* di Yogyakarta dan harian *Medden Java* di Semarang sebelum berlabuh di harian *De Expres* yang didirikan Douwes Dekker di Bandung. Soewardi juga mengasuh majalah *Het Tijdschrift* di Bandung di bawah pimpinan Douwes Dekker.

Perlawanan Ki Hadjar muda pada penjajah juga dilakukan melalui Indische Partij (IP) yang ia dirikan bersama Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo, pada 25

Desember 1912. Tiga serangkai ini kerap menyuarakan perlawanan pada penjajah. Ki Hadjar kerap membuat artikel yang berisi kritik-kritik terbuka terhadap Belanda yang disampaikan secara terus terang dan tajam.

Akibatnya, ketiga pemimpin IP ditangkap lalu dibuang ke Belanda pada Agustus 1913. Selama dalam pembuangan itu dimanfaatkan Ki Hadjar untuk belajar dalam hal pendidikan dan pengajaran sampai ia memperoleh Euro-peesche Akte (Akta Guru Eropa). Ki Hadjar banyak menimba ilmu pada para pemikir dan pelaksana aliran dan sistem di Eropa, seperti Friedrich Froebel, Maria Montessori, dan Kerschensteiner. Ki Hadjar juga menimba ilmu dari pemikir-pemikir Asia. Di antaranya penyair dan ahli pendidikan dari India Rabindranath Tagore. Mereka memang dikenal sebagai pendobrak dunia pendidikan lama dan pembangun aliran baru. Ke-empat pemikir dan pelopor aliran baru pendidikan ini membuat Ki Hadjar sangat terkesan dan membawa pengaruh besar terhadap pemikiran Ki Hadjar kelak, ketika ia mendirikan perguruan Taman Siswa.

Mendirikan Taman Siswa

Tanggal 5 September 1919, Ki Hadjar kembali ke Hindia Belanda bersama keluarganya. Kala itu ia menyebut kepulangannya ke Hindia Belanda sebagai kembalinya ia ke medan perjuangan. Dua tahun setelah kepulangannya, atau 3 Juli 1922, ia mendirikan National Onderwijs Institut Taman Siswa.

Lewat Perguruan Taman Siswa ia berusaha memadukan pemahamannya tentang pendidikan gaya Eropa yang modern dengan kebudayaan tradisional Jawa. Tidak hanya itu, melalui pendidikan di Taman Siswa, Ki Hadjar berusaha membangkitkan kesadaran golongan bumiputera untuk merdeka melalui pendidikan yang humanis nasionalis, bersifat antipenjajahan. Ki Hadjar mendirikan sekolah ini untuk mengusir penjajah. Menurut pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda tidak ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, tetapi untuk kepentingan politik elit Belanda dan

kepentingan penjajah dalam bidang politik, serta administrasi.

Di tangan Ki Hadjar, Taman Siswa menyajikan pendidikan dan pengajaran sebagai upaya sengaja dan terpadu dalam rangka memerdekakan aspek lahiriah dan batiniah manusia. Oleh karena itu, pendidikan berpusat pada anak. Pada posisi ini, anak diberi kesempatan seluas-luasnya sementara pamong (sebutan untuk guru) adalah fasilitator yang menuntun proses pengembangan potensi anak didik agar terarah namun tidak merusak dirinya.

Dengan menerapkan metode tanpa paksaan, peserta didik sebagai subjek mendapatkan ruang seluas-luasnya melakukan eksplorasi potensinya dan berekspresi secara kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. Ada tiga dasar proses pendidikan yang diterapkan di Tamansiswa, pertama, *ing ngarso sung tulodo* (pendidik berada di depan memberi teladan), kedua *ing ngadyo mangun karsa* (pendidik selalu berada di tengah dan terus-menerus memrakarsai/memotivasi), dan ketiga *tut wuri handayani* (pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta terus maju). Dasar yang ketiga, *tut wuri handayani*, diberi penegasan sebagai semboyan Taman Siswa. Sistem yang dipakai adalah *momong*, *among*, *ngemong*.

Karena kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan dan pendidikan, Ki Hajar Dewantara dianugerahi banyak gelar. Tanggal kelahirannya 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional sejak tahun 1959. Ki Hadjar Dewantara juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional, Perintis Kemerdekaan Indonesia, dan Pahlawan Nasional.

“Kalau dulu tidak ada orang yang bernama Soewardi Soeryaningrat dan kemudian menjadi Ki Hadjar Dewantara, keadaan pergerakan kebangsaan Indonesia niscaya tidak akan seperti yang kita alami,” demikian dikatakan Bung Karno saat berkunjung ke Taman Siswa, pada 1 Februari 1955. (dbs) ●



**ING NGAR-
SO SUNG
TULODO,
ING
NGADYO
MANGUN
KARSA,
TUT WURI
HANDA-
YANI.**

○ *Kewirausahaan SMA*

Implementasi Pembelajaran Kewirausahaan SMA*



Substansi pembelajaran kewirausahaan terletak pada penguatan tiap kompetensi dalam mata pelajaran yang dikolaborasi dengan kompetensi dalam program kewirausahaan.

Mengapa program kewirausahaan diberikan kepada anak SMA? Bukankah kewirausahaan itu punya SMK? Apakah berbeda kewirausahaan untuk jenjang SMA? Pertanyaan-pertanyaan senada kerap muncul dalam beberapa forum diskusi. SMA sebagai satuan pendidikan tentu harus berperan aktif dalam menyiapkan generasi di masa depan yang akan melanjutkan dan membangun bangsa ini. Pada umumnya siswa yang memilih masuk ke SMA hanya dipersiapkan untuk memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu masuk ke universitas.

Bagi sekolah menengah atas di kota-kota besar, tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang biasa. Tapi berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah. Hanya sebagian kecil yang ternyata siswanya melanjutkan ke perguruan tinggi. Terlebih lagi kuota yang diberikan oleh perguruan tinggi negeri sangatlah terbatas dibandingkan dengan jumlah siswa yang lulus. Sementara biaya mahal juga menjadi

alasan kenapa mereka tidak melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta.

Menyiapkan lulusan SMA yang mandiri tentu bukanlah hal mudah. Perlu adanya pengenalan tentang konsep-konsep kemandirian sebagai prinsip dalam hidup. Prinsip sebagai individu yang mandiri dan tidak menjadikan hidupnya hanya bergantung pada orang lain harus mulai dilakukan sejak usia sekolah. Kewirausahaan adalah kuncinya. Melalui kewirausahaan siswa SMA dibelajarkan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Bahkan mampu memberikan peluang-peluang usaha tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga orang lain.

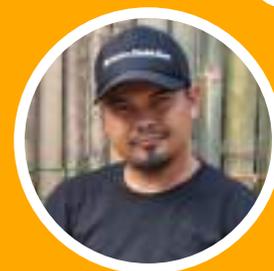
Dunia kerja selalu menuntut profesionalisme. Lulusan SMA belum memiliki keterampilan yang memadai sebagai pekerja. Sementara dunia kerja menuntut keterampilan baru di zaman baru. Banyak lulusan SMA yang tidak mampu mengoptimalkan potensinya karena sekolah masih memberikan pembelajarannya secara konvensional.

Prinsip Kewirausahaan di SMA

Pembelajaran kewirausahaan berfokus pada penguatan karakter mental wirausaha, yakni; Pembelajaran terkait penguatan kompetensi pada setiap mata pelajaran; Kegiatan pembelajaran berbasis aktivitas atau proyek; Kegiatan pembelajaran berorientasi pada kegiatan rinci tiap tahapan proses; dan Aktivitas dilakukan untuk membunikan materi pada mata pelajaran dalam implementasi di kehidupan nyata.

Banyak implementasi pembelajaran kewirausahaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Akan tetapi, efektivitasnya bergantung pada banyak faktor. Diantaranya kondisi peserta didik, situasi dan lingkungan sekolah serta daya dukung dimana ia berada.

Langkah-langkah umum yang selama ini dilakukan di SMA Bina Putera-Kopo, sekolah yang berada di pedesaan dengan sebagian besar peserta didik dari kalangan masyarakat tidak mampu. Pertama, penguatan mental wirausaha pada



Wawan Setiawan

**KEPALA SMAS BINA
PUTERA, KOPO, SERANG**

*Impelentasi Program Kewirausahaan di SMAS Bina Putera, Serang, Banten.

SMA
BINA
PUTERA
KEWIRAUSAHAAN

peserta didik; kedua, pengkondisian suasana wirausaha di sekolah; dan ketiga proses pembelajaran berbasis aktivitas.

1. Penguatan mental wirausaha pada peserta didik

Mental wirausaha yang perlu ditanamkan berupa nilai-nilai dasar pembentuk jiwa wirausaha. Nilai tersebut antara lain berani mengambil risiko, kreatif dan inovatif, mempunyai visi yang berkelanjutan, percaya diri, mandiri, aktif, enerjik dan menghargai waktu, memiliki konsep diri positif, berpikir positif, bertanggung jawab, selalu mau belajar, dan menggunakan umpan balik.

2. Pengkondisian suasana wirausaha di sekolah

Kantin dan koperasi sekolah adalah salah satu sarana belajar kewirausahaan yang nyata. Sekolah menyiapkan tempat bagi siswa untuk menjual produk-produk ide bisnisnya. Di SMA Bina Putera kantin dikelola dengan melibatkan siswa sebagai pemasok produk-produk yang akan dijual di kantin. Selain itu siswa juga

diberikan tugas untuk menjaga kantin secara terjadwal. Pengelolaan kantin dengan melibatkan siswa diharapkan mampu membelajarkan siswa tentang kewirausahaan secara nyata.

Alat pembayaran khusus juga bisa dibuat sebagai salah satu upaya memperkenalkan kepada siswa tentang uang beredar. Siswa di SMA Bina Putera menggunakan alat pembayaran khusus yang hanya berlaku di sekolah. Alat pembayaran khusus tersebut diluncurkan oleh Bank sekolah. Siswa akan menukarkan uang rupiahnya di *money changer* yang sudah disiapkan. Pengelola kantin akan menukarkan hasil penjualannya ke *money changer* hari itu juga sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Semua dengan melibatkan siswa.

3. Proses pembelajaran berbasis aktivitas

Proses pembelajaran wirausaha berbasis aktivitas ini meliputi empat langkah utama. Yaitu, pertama menghidupkan mimpi; kedua yakinkan dan niatkan;

ketiga membuat perencanaan; dan keempat lakukan.

Pengetahuan peserta didik terhadap kewirausahaan masih sangat minim di mana mereka lebih banyak mengartikan kewirausahaan dengan berdagang, berusaha secara mandiri, tidak diatur orang lain, dan dapat menentukan segala sesuatunya sendiri. Mereka beranggapan usaha sebagai "jalan" bukan tujuan utama. Hal ini tercermin dari keinginan untuk "kuliah" tapi sebelumnya "bekerja" dulu atau "usaha" dulu sebagai bekal kuliah.

SMA Bina Putera, mencoba melakukan proses pembelajaran kewirausahaan dengan cara berbeda. Tidak ada jam tatap muka di kelas. Pembelajaran kewirausahaan dilakukan berdasarkan *project base learning*. Projek ini dilakukan secara kolaborasi oleh berbagai guru mata pelajaran. Dengan projek ini siswa diharapkan mampu menguasai kompetensi yang disesuaikan dengan aktivitas nyata. ●



Revitalisasi Ekosistem Pendidikan

Apa definisi pendidikan kita? Tentu saja tidak ada acuan lain bagi kita selain Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Dalam UU Sisdiknas disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Substansi inti dari UU Sisdiknas tersebut adalah bahwa pendidikan merupakan usaha yang dilandasi kesadaran dan terencana untuk menciptakan proses pembelajaran dan suasana belajar. Tujuannya, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri secara aktif untuk mendapatkan keterampilan, akhlak mulia, kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, dan kekuatan spiritual keagamaan yang diperlukan oleh dirinya sendiri dan masyarakat.

Lantas proses pembelajaran dan suasana belajar ideal seperti apa yang harus terwujud? Jawabannya tentu saja tidak ada definisi standar karena di sinilah para guru dituntut untuk unjuk kompetensi menciptakan proses dan suasana belajar yang menggembirakan sesuai dengan kondisi peserta didik dan bahkan lingkungan di sekitarnya.

Menciptakan proses dan suasana belajar ini pula yang belakangan diharapkan terwujud tatkala bangsa kita menghadapi wabah pandemi global Covid-19. Tak hanya oleh guru tetapi juga para orangtua di saat proses pembelajaran (khususnya di beberapa daerah terdampak wabah)



Tujuannya, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri secara aktif untuk mendapatkan keterampilan, akhlak mulia, kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, dan kekuatan spiritual keagamaan yang diperlukan oleh dirinya sendiri dan masyarakat.

dialihkan sementara ke rumah. Para guru dengan beragam dukungan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi telah menerapkan pembelajaran *online*, maka para orangtua berperan menciptakan proses dan suasana belajar di rumah.

Konsep mewujudkan pendidikan ideal melalui kolaborasi-sinergi guru di sekolah dan orangtua (di rumah), sejatinya bukan hanya pada saat kondisi "darurat" seperti dalam menghadapi pandemi Covid-19, melainkan harus menjadi kesadaran bersama dan diimplementasikan di keseharian kita dalam mendidik anak.

Kesadaran itulah yang selama ini hilang dari bangsa ini, bahkan dari diri kita. Karena itu, perlu kita bangun kembali. Direvitalisasi. Bahkan bukan saja antara guru (sekolah) dan orangtua, tetapi juga lingkungan (masyarakat) sebagai satu ekosistem pendidikan yang tidak terpisahkan. ●

informasi



L O M B A • B E A S I S W A

Beasiswa

Beasiswa Kuliah Seni S1-S2 Korea AMA Scholarship

Beasiswa ini merupakan beasiswa penuh di Korea National University of Arts (K-Arts) yang merupakan Universitas Seni terkemuka di Korea Selatan. Program studi yang ditawarkan cukup banyak, diantaranya: Vocal Music, Instrumental Music, Composition, Conduction, Acting, Directing, Stage Design, dan masih banyak lagi. Selain dana pendidikan penuh, penerima beasiswa ini juga akan mendapatkan tiket pesawat PP Indonesia-Korea Selatan, tunjangan bulanan, gratis kursus Bahasa Korea, asuransi kesehatan, dan masih banyak lagi. Untuk info lebih lanjut dapat melalui <https://indbeasiswa.com/2019/04/beasiswa-kuliah-seni-s1-s2-di-korea.html>

Batas Pendaftaran:
31 Mei 2020

Info selengkapnya:



Beasiswa IPB Kuliah S1 Program Beasiswa Utusan Daerah (BUD)

Program Beasiswa Utusan Daerah merupakan cara penerimaan mahasiswa baru program Sarjana IPB yang direkomendasikan dan dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan atau lembaga swasta yang ketika lulus diharapkan kembali ke daerahnya untuk membangun daerah. Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ini dapat diakses melalui <https://indbeasiswa.com/2020/04/beasiswa-ipb-bud-utusan-daerah.html>

Batas Pendaftaran:
30 Mei 2020

Info selengkapnya:



Lomba

Lomba Video Pendek BNPT Nasional 2020

Badan nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Bidang Pemuda dan Pendidikan Subdit Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan Lomba Video pendek dengan tema Kita Indonesia. Syarat dan ketentuan serta informasi lebih lanjut dapat di lihat melalui link berikut. Semoga bermanfaat! <https://fkptcenter.or.id>

Periode:
Maret-Oktober 2020

Info selengkapnya:



EduCenter Blog Competition: "Pendidikan Sebagai Kunci Penguatan Peran Perempuan"

Dalam rangka Hari Perempuan Internasional, EduCenter menyelenggarakan Blog Competition dengan tema Pendidikan Sebagai Kunci Penguatan Peran Perempuan dengan total hadiah Rp 3.750.000,- Informasi lebih lanjut dapat di lihat melalui link berikut. Semoga bermanfaat! <https://educenter.id/blogcompetition/>

Periode:
8 Maret-3 Mei 2020

Info selengkapnya:



Rumah Belajar Kemdikbud



Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru PAUD, SD, SMP, SMA/SMK sederajat. Dengan menggunakan Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di Rumah Belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Info selengkapnya : <https://belajar.kemdikbud.go.id/>



Direktorat SMA
Jl. RS Fatmawati Cipete
Jakarta Selatan

☎ 021-75911532
www.psm.kemdikbud.go.id

SMA Maju Bersama Hebat Semua
©2020 Direktorat SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan